



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

LAKIP 2025



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dapat tersusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja ini, juga sebagai laporan evaluasi dari pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Namun disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang. Dan ucapan terimakasih kepada para pemangku kepentingan khususnya unit kerja yang ada dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif sehingga penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

Palu, 03 Maret 2026

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah



RICHARD ARNALDO, SE., MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	7
A. Tugas dan Fungsi	7
B. Struktur Organisasi	9
1.3. Isu - Isu Strategis	11
1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	19
2.2. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	25
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
2.4. Perjanjian Kinerja	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	33
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	37
B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	61
C. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra	37
D. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Capaian Nasional / Daerah Lainnya	67
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	71
F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	88

G. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja daya	91
3.2. Realisasi Anggaran	95
3.3. Penghargaan	98

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	101
4.2 Permasalahan	102
4.3 Rekomendasi	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.....	2
Tabel 1.2	Inventaris dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	2
Tabel 1.3	Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	14
Tabel 1.4	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	18
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026.....	21
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 (Arsitektur Kinerja)	22
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029.....	23
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	25
Tabel 2.5	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	27
Tabel 2.6	Pagu Anggaran Belanja Tahun 2025.....	29
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.....	29
Tabel 2.8	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.....	30
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
Tabel 2.10	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	36
Tabel 3.2	Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berdasarkan RENSTRA Tahun 2021-2026.....	35

Tabel 3.3	Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029.....	36
Tabel 3.4	Target dan Realisasi PERINDAG Sulteng Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026	38
Tabel 3.5	Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2025 (US\$ Juta).....	39
Tabel 3.6	Target dan Realisasi PERINDAG Sulteng Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029.....	41
Tabel 3.7	Tabel Kawasan Industri dan Tenant di Sulawesi Tengah	42
Tabel 3.8	Rekapitulasi Pelaksanaan Pasar Murah / Operasi Pasar Tahun 2025 ..	43
Tabel 3.9	Perkembangan Tingkat Harga Rata-Rata Sulawesi Tengah dan Koefisien Variasinya dengan Menggunakan Pembobotan (Januari – Desember 2025).....	46
Tabel 3.10	Kegiatan Pameran Tahun 2025.....	47
Tabel 3.11	Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2025 (US\$ Juta) terhadap SKA	48
Tabel 3.12	Rekapitulasi Nilai Ekspor Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2025	50
Tabel 3.13	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (RENSTRA 2021-2026).....	53
Tabel 3.14	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (RENSTRA 2025-2029).....	56
Tabel 3.15	Data Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 s/d 2025	60
Tabel 3.16	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap RENSTRA (RENSTRA 2021-2026)	61
Tabel 3.17	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap RENSTRA (RENSTRA 2025-2029)	63
Tabel 3.18	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Capaian Nasional / Daerah Lainnya (RENSTRA 2021-2026).....	67
Tabel 3.19	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Capaian Nasional / Daerah Lainnya (RENSTRA 2025-2029).....	68
Tabel 3.20	Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2021-2025.....	79
Tabel 3.21	Rekap Pengaduan Konsumen oleh BPSK Tahun 2025.....	79

Tabel 3.22	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (RENSTRA 2021 -2026)	89
Tabel 3.23	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (RENSTRA 2025-2029)	90
Tabel 3.24	Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	92
Tabel 3.25	Realisasi APBD TA 2025 berdasarkan Belanja	96
Tabel 3.26	Realisasi APBD TA 2025 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Teknis	96
Tabel 3.27	Realisasi APBD TA 2025 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	10
Gambar 2	Grafik Kondisi Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024-2025.....	51
Gambar 3	Pelaksanaan Pasar Murah	78
Gambar 4	Pelaksanaan TEI.....	81
Gambar 5	Pelaksanaan Sosialisasi Peta Perwilayahan Industri.....	84
Gambar 6	Pelatihan vokasi pengelasan	86
Gambar 7	Pelatihan vokasi pengelasan	87
Gambar 8	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Richard Arnaldo, SE., M.SA., menghadiri kegiatan Indonesian Market Surveillance (INAMS) Award.....	99
Gambar 9	Penghargaan Tahun 2025	101

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun sebagai bahan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah yang disajikan dalam bentuk penyajian informasi kinerja atas pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan, peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Namun dengan telah disahkannya Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke-2 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2025-2029 yaitu :

“Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan”.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Kewenangan yang diatur dalam Perundang-Undangan dan Peraturan Teknis lainnya. Hasil upaya itu dapat dilihat pada hasil pencapaian sasaran kinerja secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu :

Ringkasan Pencapaian Tahun 2025 sebagai berikut :

➤ **RENSTRA Tahun 2021-2026**

1. IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%) dengan realisasi sebesar 5,12% dan tingkat capaian sebesar 72,42%.
2. IKU 2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) dengan realisasi sebesar 11.003,93 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 92,09%.
3. IKU 3 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) dengan realisasi sebesar 5,9% dan tingkat capaian sebesar 81,94%.
4. IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) dengan realisasi sebesar 41,24% dan tingkat capaian sebesar 94,99%.

➤ **RENSTRA Tahun 2021-2026**

1. IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) dengan realisasi sebesar 41,24% dan tingkat capaian sebesar 94,99%.
2. IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) dengan realisasi sebesar 5,9 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 146,85%.
3. IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) dengan realisasi sebesar 11.003,93 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 99,66%.
4. IKU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) dengan realisasi sebesar 132,25% dan tingkat capaian sebesar 143,50%.
5. IKU 5 Nilai ekspor produksi industry non-migas (Juta USD) dengan realisasi sebesar 19.325,87 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 105,04%.
6. IKU 6 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Orang) dengan realisasi sebesar 137.860 orang dan tingkat capaian sebesar 101,80%.
7. IKU 7 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%) dengan realisasi sebesar 2,32% dan tingkat capaian sebesar 177,10%.

Pencapaian tersebut didukung dengan kerangka pendanaan APBD sebesar Rp. 38.657.951.981,30 dengan realisasi Rp. 33.878.850.789,00 atau sebesar 87,64% untuk realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 95%.

Palu, 03 Maret 2026

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah



RICHARD ARNALDO, SE., MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan selama satu tahun anggaran. LAKIP disusun sebagai implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, memperkuat struktur industri, serta menjaga stabilitas dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Peran tersebut dilaksanakan melalui perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi kepada pelaku usaha industri dan perdagangan.

LAKIP ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Penyusunan laporan ini mengacu pada dokumen perencanaan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Melalui LAKIP, diharapkan dapat diketahui tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, efektivitas penggunaan sumber daya, serta berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, LAKIP juga menjadi sarana evaluasi kinerja dan dasar perbaikan berkelanjutan

guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja organisasi, serta akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di masa mendatang.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan terkait urusan perindustrian dan perdagangan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 159 orang personel yang terdiri dari PNS 100 orang dan PPPK 59 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pendidikan						Golongan						Eselon			
			L	P	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	V	VII	IX	IV	III	II
1	Sekretariat	38	22	17		2	1	27	9				17	4	2		16	3		1
2	Bid. SP2I	14	6	8		1		7	6				5	4	1		4			1
3	Bid. PSDI	18	7	11		1		12	5			1	8	3			6			1
4	Bid. Dagri	15	7	8		1		10	3	1			5	3	1		6			1
5	Bid. Daglu	18	10	8		2		9	7				10	1	2		5			1
6	UPT.PSMB	16	5	11		1	2	12	1				11	1			4	2		1
7	UPT.P2IPK	21	11	10		4	1	10	1			1	14	1	3	1	2	3		1
8	UPT. P2K	19	9	10		1		15	3			1	11	1			6	3		1
JUMLAH TOTAL		159	77	83	0	13	4	102	35	1	0	3	81	18	9	1	49	11	7	1

Adapun dukungan sarana dan prasarana dengan kondisi baik yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian disajikan pada tabel 2

Tabel 1.2
Inventaris dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA. 2025

No.	Jenis Barang	Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Tidak Ditemukan
1	A.C. Split	75		5	3
2	A.C. Window	21			
3	Alat Dapur lainnya	274			
4	Alat Kantor Lainnya	21		7	
5	Alat Kedokteran umum lainnya	1			
6	alat laboratorium fisika lainnya (dst)	31			
7	alat laboratorium kimia lainnya (dst)	2			
8	alat laboratorium lain lainnya (dst)	37			

9	Alat Laboratorium lainnya	16			8
10	alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst)	10			
11	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	1			
12	alat laboratorium umum lainnya (dst)	3			
13	Alat Pembantu Kebakaran	5			
14	Alat Pembersih lainnya	5			
15	Alat Penghancur Kertas	1		1	
16	Alat Prosesing lainnya	1			
17	Alat Rumah Tangga Lain-lain	21			
18	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1			
19	Aqua Bidest Apparatus	1			
20	Bangku Tunggu	1			
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1			1
22	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11		1	
23	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	4		1	2
24	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2		1	4
25	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen			1	
26	Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen				1
27	Bejana Ukur				2
28	Botol Uji Berbagai Ukuran	50			
29	Brandkas	2			
30	Camera film	3		10	
31	Camera Video	2			
32	Cawan Porselin	12			
33	CCTV - Camera Control Television System	6		2	
34	Coffee Maker	1			
35	Crusible Penyaring	12			
36	Dispenser	17		6	
37	Display	8			
38	Dropping Bottle	6			
39	electric generating set lainnya (dst)	1			
40	Exhaust Fan	13			
41	External/ Portable Hardisk			15	
42	Facsimile	1			
43	Filing Cabinet Besi	22			
44	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2			
45	Gedung Pos Jaga Permanen	2			
46	Gelas Piala	12			
47	general laboratory tool lainnya (dst)	1			

48	Generator	1			
49	Generator Set(Lab Scale)	1			
50	Genset	1			
51	Gordyin/Kray	206		1	
52	Hard Disk			2	
53	Humadity Chamber (General Laboratory Tool)	1			
54	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1			
55	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	1			
56	Jalan Khusus Lainnya			1	5
57	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1			
58	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA			1	
59	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)			1	
60	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	1			
61	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	2			
62	Jeep	2			
63	Kipas Angin	8			
64	Kitchen Set	1			
65	Kompor Gas (Alat Dapur)	4			
66	Kursi Besi/Metal	61			
67	Kursi Biasa	40			
68	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	15			
69	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III			25	
70	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10			
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	1			
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1	
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2		2	
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10		9	
75	Kursi Kerja Pejabat lainnya	122		41	
76	Kursi Lipat	15			
77	Kursi Putar	31			
78	Kursi Rapat	124		30	4
79	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	5			
80	Kursi Tamu	6			
81	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	71			
82	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1			

83	Labu Takar (Volumetrik) berbagai kapasitas	10			
84	Lain-lain				1
85	Lap Top	59		26	5
86	Layar Film/Projector	4			1
87	LCD Projector/Infocus	2			
88	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3			
89	Lemari Asam	1			
90	Lemari Besi/Metal	6			
91	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	36		4	2
92	Lemari Display	1			
93	Lemari Es	14			
94	Lemari Kaca	11			
95	Lemari Kayu	4			
96	Local Area Network (LAN)	1			
97	Locker	6			
98	Manometer	12			
99	Meja 1/2 Biro	10		6	
100	Meja Kerja Besi/Metal	23			
101	Meja Kerja Kayu	63		36	2
102	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3		2	
103	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9		9	
104	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4			
105	Meja Komputer	10			
106	Meja Makan Besi	6			
107	Meja Rapat	29			
108	Meja Rapat Pejabat Eselon II			1	
109	Meja Rapat Pejabat Eselon III			3	
110	Meja Rapat Pejabat lainnya	22			
111	Meja Resepsionis	3			
112	mesin ketik lainnya (dst)	1			
113	Mesin Ketik Listrik	10			
114	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3			
115	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1			
116	Mesin Laminating	1			
117	Mesin Pemotong Rumput	4			
118	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1		2	
119	Mesin Penghitung Uang	1		1	
120	Meubeleur lainnya	127			
121	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1			
122	Muffie Furnace	1			
123	Note Book	7		4	
124	Oven (Alat Laboratorium Umum)	33			
125	Oven Listrik	1			
126	P.C Unit	93		43	
127	Pagar Permanen	1			

128	Papan Nama Instansi	1		4	
129	Papan Pengumuman	8		1	
130	Papan Visual/Papan Nama	3		2	
131	Partisi	35			
132	Pengurus Barang				
133	Peralatan Komputer lainnya	1			
134	Peralatan Personal Komputer lainnya	24		15	
135	peralatan studio audio lainnya (dst)	2			
136	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	1			
137	Personal Komputer lainnya	1		1	
138	Pesawat Telephone	1			
139	Pick Up	1			
140	Pompa Air	1			
141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	110		24	
142	Rak Besi	1			
143	Rice Cooker (Alat Dapur)	1			
144	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen		1		
145	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			1	
146	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen			1	
147	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2			
148	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6			
149	Scooter	8			
150	Sepeda Motor	48		2	
151	Sofa	10			
152	Sound System	8			
153	Station Wagon	11			
154	Sumur Gali (SGL)	2			
155	Tablet PC	3			
156	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6			
157	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1			
158	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1			
159	Tangga Aluminium	3			
160	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	29			
161	Telephone Mobile	2			
162	Televisi	25			
163	Tenda			5	
164	Tenda Sangga	7			
165	Termometer Standar	2			

166	Thermohyrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	1			
167	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	1			
168	Timbangan Elektronik	1			
169	Timbangan Meja Capasitas 10 Kg	2			
170	Tips Pipet Sesuai Ukuran	12			
171	Tool Kit Set	10			
172	Top Loading Balance (Alat Laboratorium Farmasi)	1			
173	Top Loading Balance (Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik)	1			
174	TV Monitor			2	
175	Wireless			2	
176	Wireless Amplifier	1			
Jumlah		2.498	1	361	41

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan nomenklatur setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Ekonomi khususnya terkait dengan urusan perindustrian dan urusan perdagangan, menghadapi berbagai perkembangan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan globalisasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan

Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
- g. pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.

Dalam perkembangan saat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah semakin dituntut untuk dapat menggali sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya mewujudkan visi misi RPJMD 2021-2026 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui program dan kegiatan penguatan ekonomi daerah.

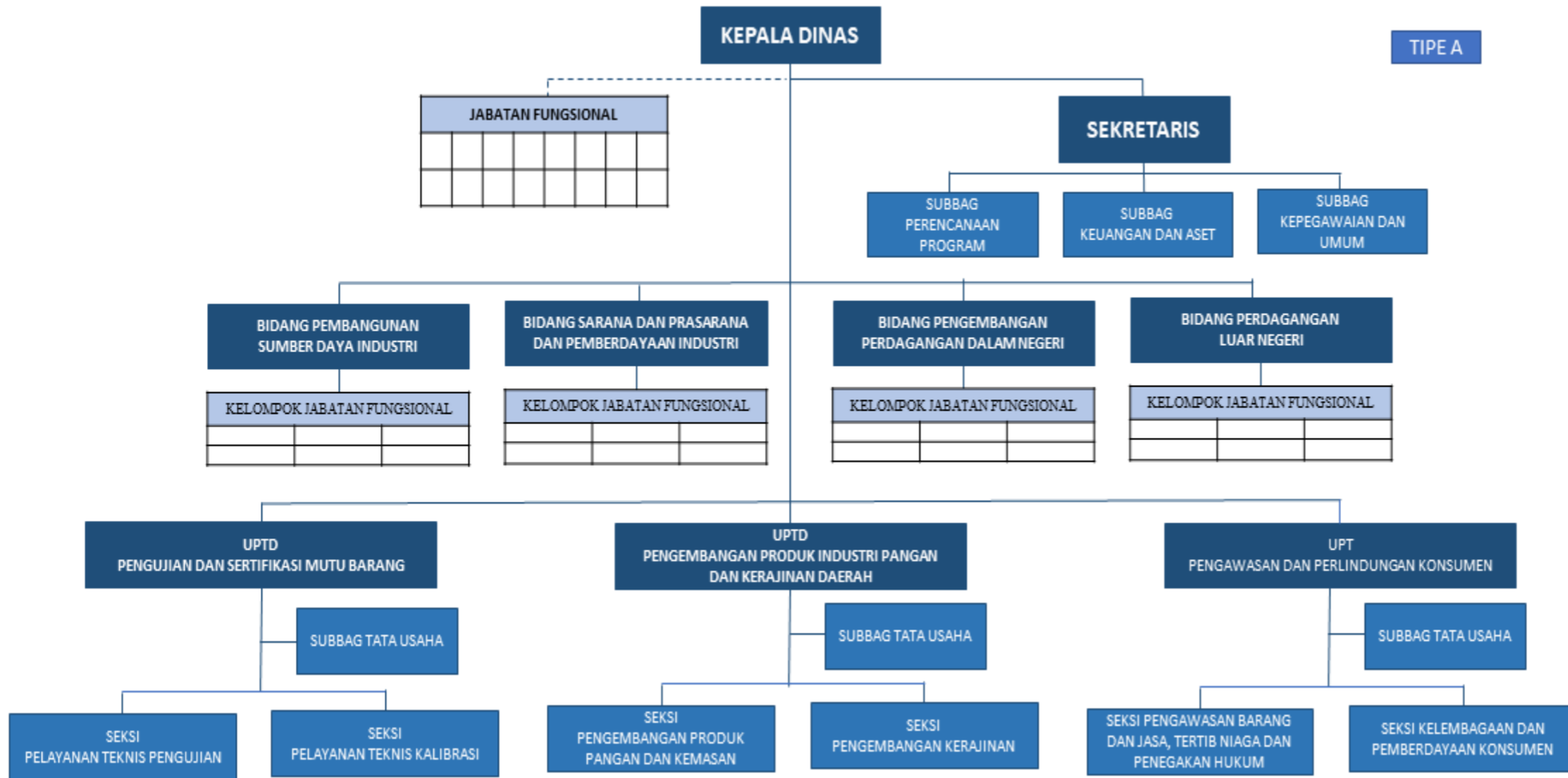
Perkembangan sektor ekonomi tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor perindustrian dan perdagangan. Pemetaan hambatan dan tantangan dalam perencanaan sangat diperlukan sebagai bahan pemikiran untuk berpikir rasional (Rational Frame

Work) dalam menangkap peluang dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Hal tersebut telah tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan referensi wajib yang digunakan sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

B. Struktur Organisasi

Operasional pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari seorang Kepala Dinas dan seorang Sekretaris dengan Tiga Kepala Sub Bagian dan Empat Kepala Bidang yang masing-masing bidang memiliki tiga Kepala Seksi serta tiga kepala UPT yang membawahi masing satu kepala bagian dan dua kepala seksi. Lebih jelasnya, struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersaji pada gambar 5 berikut:

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 (Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Daerah)



1.3 Isu Strategis / Permasalahan

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMD sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Perindustrian dan Perdagangan telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi

rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor).

Disisi lain Teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar, pemerintah daerah dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi harus diikuti dengan pengembangan industri lokal yang berbasis keunggulan daerah yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.

Disisi lain untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri Sulawesi Tengah memerlukan arahan dan dukungan kebijakan serta bantuan pendanaan pemerintah pusat. Kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah akan bangun industri yang kuat dalam jangka menengah, maupun jangka panjang mampu memberikan multiplier effect tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja maupun value added pada hasil pengolahan hulu komoditi unggulan akan tetapi juga

akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian nasional. Juga memberikan pemerataan pembangunan industri skala besar di luar wilayah Jawa yang selama ini menjadi central pembangunan.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online. Adapun isu strategis secara spesifik sebagai berikut:

Tabel 1.3 Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS DAERAH	ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
Potensi sumber daya alam	Hilirisasi Sektor Pertanian, Perikanan /Kelautan, Pariwisata dan Pengelolaan Hasil Pertambangan belum Optimal	Peningkatan kualitas dan daya saing sector unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiscal	Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang tingkat kemiskinan	Rendahnya Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, Perikanan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri. 2. Penguatan sistem informasi dan data industri, sebagai bagian dari pengendalian izin usaha industri serta pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah. 3. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pameran dagang internasional, nasional, dan lokal, peningkatan citra produk, serta pembinaan pelaku usaha ekspor.

<p>Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup</p>	<p>Hilirisasi Sektor Pertanian, Perikanan /Kelautan, Pariwisata dan Pengelolaan Hasil Pertambangan belum Optimal</p>	<p>Peningkatan kualitas dan daya saing sector unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiscal</p>	<p>Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p>	<p>Memantapan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital dan ekonomi biru</p>	<p>Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang tingkat kemiskinan</p>	<p>Rendahnya Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, Perikanan dan Pariwisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri. 2. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui optimalisasi pengendalian stabilisasi harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembinaan dan pengawasan sarana distribusi, pengendalian perizinan dan pendaftaran perusahaan, promosi dan pemasaran produk dalam negeri guna mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 3. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pameran dagang internasional, nasional, dan lokal, peningkatan citra produk, serta pembinaan pelaku usaha ekspor. 4. Peningkatan perlindungan konsumen melalui optimalisasi pengawasan barang beredar, pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen, serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
--	--	---	--	--	---	--	---

							5. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi.
Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Kondisi Infrastruktur dan Konektivitas belum optimal dan merata	Peningkatan kualitas dan daya saing sector unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiscal	Perkembangan Teknologi	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Tingginya ketimpangan antarkelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah	Inovasi Pembiayaan Pembangunan dalam Mendukung Kesenambungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri. 2. Penguatan sistem informasi dan data industri, sebagai bagian dari pengendalian izin usaha industri serta pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.

1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada akhir pelaksanaan tahun anggaran 2024 masih ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan guna perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja. Meskipun dari hasil monitoring dan evaluasi sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja masih lemah dan SAKIP belum diimplementasikan secara baik dan konsisten.

Disadari lemahnya kontrol pengawasan internal terhadap proses bisnis pengukuran capaian kinerja mengakibatkan tidak jarang terjadi keterlambatan dalam proses penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan untuk dilakukan secara berkala. Adapun tindak lanjut atas LHE AKIP Tahun 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
1	Mnyelaraskan kembali isu-isu strategis dalam Rencana Kinerja yang disesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kerja.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan check and review untuk memastikan dokumen yang disusun telah sesuai ketentuan. Serta memperhatikan program-program strategis yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen RENSTRA, RENJA, Arsitektur Kinerja, dan PK selaras dengan RPJMD	Bulan Juli, Agustus, Oktober	Sekretaris Dinas	https://drive.google.com/drive/folders/1GjEWwWszX-vcfhSln7KJJggj2H8q7zY?usp=sharing
2	Memastikan bahwa membuat atau menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkala di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyusun Laporan kinerja secara berkala.	Dokumen Laporan Kinerja semesteran dan tahunan	Bulan Juli (Laporan Kinerja Semester 1) dan Desember (Pengumpulan data awal Laporan Kinerja Tahunan)	Sekretaris Dinas	https://drive.google.com/drive/folders/1RgGkpSGK9ohCYvWxOmCGao4UxWu9cxH?usp=sharing
3	Melakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang	Dalam pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan desk evaluasi kinerja yang melibatkan semua unit kerja secara berjenjang dan telah tercatat dalam aplikasi SALIARA.	Pencatatan hasil Evaluasi Kinerja terinput pada aplikasi SALIARA	Minggu ke-2 Juli, Minggu ke2 Oktober, Minggu ke-3 dan ke-4 Desember	Sekretaris Dinas	https://drive.google.com/drive/folders/1x08NQr85uiLun5EjrzYcvBgQFgLc3-yX?usp=sharing
4	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan sarana informasi berupa website dinas sebagai bagian dari keterbukaan informasi public.Selain itu penyampaian laporan kinerja telah menggunakan aplikasi penyimpanan di google drive, serta telah dilaporkan pada aplikasi SALIARA secara berkala	Dokumen Hasil Desk Evaluasi Kinerja	Minggu ke-1 Juli, Minggu ke2 Oktober, Minggu ke-3 dan ke-4 Desember	Sekretaris Dinas	https://drive.google.com/drive/folders/1_nTHZJewftap8v0RvPVpo6hOMGPOZUo4?usp=sharing
5	Memastikan bahwa di dalam Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan memuat informasi yang memadai untuk perbaikan kinerja organisasi dalm pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.	Dalam pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan desk evaluasi kinerja yang melibatkan semua unit kerja secara berjenjang. Laporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan menyajikan pembanding data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar dalam perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.	Dokumen LAKIP memuat informasi perbaikan	Minggu ke-2 Juli, Minggu ke2 Oktober, Minggu ke-3 dan ke-4 Desember	Sekretaris Dinas	https://drive.google.com/drive/folders/1MT9POrR4W5XJE-3OJHAp4J2ab-bWs66J?usp=drive_link

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD 2021-2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2021-2026), adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.

Indikator 1 : *Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)*.

Indikator 2 : *Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)*.

Indikator 3 : *Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)*.

Indikator 4 : *Inflasi pangan bergejolak (%)*.

Tujuan 2 : Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas.

Indikator 5 : *Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)*.

Indikator 6 : *Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)*.

Indikator 7 : *Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)*.

Indikator 8 : *Cakupan bina pelaku IKM (persen)*.

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).

Sasaran 3 : Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan.

Indikator 9 : *Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1 Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	1 Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20
			2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	3.828,92	5.203,94	5.849,88	6.648,15	6.903,07	7.274,98
			3 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
			4 Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	5 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,37%	11,69%	12,00%	12,60%	13,20%	13,80%
			6 Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	1.097	1.371	1.646	1.920	2.194	2.468
			7 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.823	67.911	68.000	68.088	68.176	68.264
			8 Cakupan bina pelaku IKM (persen)	13,83	11-14	11-14	11-14	11-14	11-14
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	3 Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	9 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	62	64	66	68	70,05

Adapun dengan adanya Penyelarasan terhadap Arsitektur Kinerja, pada Tahun 2025 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 diselaraskan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 (Arsitektur Kinerja)

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Perdagangan	1	Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)	na	na	na	na	7,07	7,08
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	2	Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)	3.828,92	5.203,94	9.525,71	10.668,80	11.949,06	13.382,94
3	Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah	3	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	na	na	na	na	7,20	7,10
4	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,37	11,69	32,00	41,00	41,45	42,00

Pada Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke-2 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2025-2029 yaitu :

“Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan”.

Sejalan dengan Misi ke-2 RPJMD 2025-2029 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2025-2029), adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,18	40,97-41,45	41,5-42,48	42,5-43,99	43,5-45,49	47,00-50,99	48,51-51,1	
		Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	7,4	11,1	10,93	10,75	10,58	10,4	10,23	
		Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	10.540,90	11.041,52	11.543,86	12.046,11	12.548,26	12.850,33	13.152,40	
			Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)	159,47	90,74 - 92,16	92,80 – 94,15	94,91 – 96,50	96,50 – 98,79	98,80 – 101,20	101,20 – 103,16	
		Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas	Nilai ekspor produksi industri non-migas (Juta USD)	17.828,09	18.398,59	18.969,09	19.539,59	20.110,09	20.113,29	20.116,00	

	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industry	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Orang)	135.160	135.417,00	135.674,00	135.931,00	136.188,00	136.445,00	136.702,00	
	Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)	1,21	1,31	1,51	1,72	1,92	2,12	2,32	

2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 10 program yang terdiri dari 6 program Urusan Perdagangan, 3 program Urusan Perindustrian, dan 1 program penunjang. Adapun Struktur program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2025

NO	URAIAN ROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN(Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
1	Bidang DAGRI				
	Prog.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	78.766.650	37.397.250	41.369.400
	Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	78.766.650	37.397.250	41.369.400
	Prog.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	191.038.800	99.354.400	91.684.400
	Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	191.038.800	99.354.400	91.684.400
	Prog.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.570.790.550	1.550.525.250	20.265.300
	Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	110.756.950	56.075.200	54.681.750
	Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.395.862.850	1.464.417.550	-68.554.700
	Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	64.170.750	30.032.500	34.138.250
	Prog.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	255.899.000	124.368.300	131.530.700
	Keg.	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	107.037.250	51.457.600	55.579.650
	Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	108.299.750	58.475.900	49.823.850
	Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	40.562.000	14.434.800	26.127.200
2	Bidang DAGLU				
	Prog.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	236.290.850	113.651.400	122.639.450

	Keg.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	236.290.850	113.651.400	122.639.450
	Prog.	Pengembangan Ekspor	671.189.600	614.146.350	57.043.250
	Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	671.189.600	614.146.350	57.043.250
3	Bidang PSDI				
	Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.100.470.800	622.934.000	477.536.800
	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.100.470.800	622.934.000	477.536.800
	Prog.	Pengendalian Izin Usaha Industri	277.999.750	183.910.850	94.088.900
	Keg.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	277.999.750	183.910.850	94.088.900
4	Bidang SP2I				
	Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.986.000.300	4.927.745.250	58.255.050
	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4.986.000.300	4.927.745.250	58.255.050
	Prog.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	90.206.138	38.057.735	52.148.403
	Keg.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	90.206.138	38.057.735	52.148.403
5	UPT PSMB				
	Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	529.227.358	440.935.431	88.291.927
	Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	529.227.358	440.935.431	88.291.927
6	UPT P2IPK				
	Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.023.301.752	1.155.456.316	-132.154.564
	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.023.301.752	1.155.456.316	-132.154.564
7	UPT P2K				
	Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.235.414.000	1.077.726.800	157.687.200
	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.013.626.150	945.669.400	67.956.750
	Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	221.787.850	132.057.400	89.730.450
Jumlah			12.246.595.548,00	10.986.209.332,00	1.260.386.216,00

Tabel 2.5
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung
Pencapaian Sasaran Tahun 2025

NO	URAIAN ROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN(Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
1	SEKRETARIAT				
	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.938.474.357	19.207.409.045	731.065.312
	Keg.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	780.179.900	376.917.250	403.262.650
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.749.050.447	16.810.158.300	-61.107.853
	Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	176.472.000	121.135.500	55.336.500
	Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.271.100	58.145.000	112.126.100
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.209.290	366.492.675	27.716.615
	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	506.422.300	230.882.900	275.539.400
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.856.820	481.703.620	52.153.200
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	628.012.500	761.973.800	-133.961.300
2	UPT. PSMB				
	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.193.857.805	7.309.956.079	-116.098.274
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	284.430.000	284.430.000	0
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.926.281	83.813.113	89.113.168
	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.399.941.876	6.550.618.826	-150.676.950
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.109.648	264.726.848	-30.617.200
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.450.000	126.367.292	-23.917.292
3	UPT. P2IPK				
	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	982.971.623	784.053.125	198.918.498

	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	504.900.000	391.740.000	113.160.000
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.486.765	45.423.315	19.063.450
	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.125.000	0	86.125.000
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.411.858	199.436.310	-15.024.452
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.048.000	147.453.500	-4.405.500
4	UPT. P2K				
	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	392.483.200	370.324.400	22.158.800
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	231.960.000	231.960.000	0
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.364.500	28.045.700	29.318.800
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.606.800	48.606.800	0
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.551.900	61.711.900	-7.160.000
Jumlah			28.507.786.985	27.671.742.649	836.044.336

Pagu Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2025 sebelum revisi sebesar Rp. **40.754.382.533** dan Rp. **38.657.951.981,30** sesudah revisi, seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.6 Pagu Anggaran Belanja Tahun 2025

Uraian	Pagu TA 2025	Pagu Akhir TA 2025
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.500.000	218.500.000
Retribusi Daerah	167.500.000	173.500.000
Lain-lain PAD yang Sah	45.000.000	45.000.000
BELANJA DAERAH	40.754.382.533	38.657.951.981,30
BELANJA OPERASI	40.148.796.633	32.049.110.105,30
Belanja Pegawai	15.134.383.497	15.389.417.000,30
Belanja Barang dan Jasa	24.214.413.136	15.859.693.105,00
Belanja Hibah	800.000.000	800.000.000,00
BELANJA MODAL	605.585.900	6.608.841.876,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	605.585.900	6.608.841.876,00
Jumlah Belanja	40.754.382.533	38.657.951.981,30

2.3 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Visi dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka untuk tahun 2021-2026 IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dicapai sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran IKU	IKU	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah	1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)	Penjelasan : Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan growth ratio. Growth ratio adalah parameter yang digunakan untuk menunjukkan persentase pertumbuhan suatu variabel dalam kurun waktu tertentu. Formulasi :	BPS	BID. DAGRI, UPTD. PSMB, UPTD. P2K

			(Nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan tahun berjalan -nilai PDRB ADHK Sektor Perdagangan tahun sebelumnya)/PDRB ADHK Sektor Perdagangan tahun sebelumnya x 100%		
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	2 Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)	Penjelasan : Ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Nilai positif dari ekspor bersih (surplus perdagangan) dan Nilai negatif ekspor neto (defisit perdagangan) Formulasi : Nilai Ekspor Bersih =Nilai Ekspor- nilai impor	BPS	BID. DAGLU
3	Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah	3 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	Penjelasan : Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kabupaten/Kota di dalam Satu Provinsi Formulasi : (KVH(barang 1) + KVH (barang2) + KVH (barang_n)) / jumlah bapokting	Data Pemantauan harga Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	BID. DAGRI, UPTD. PSMB, UPTD. P2K
4	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	Penjelasan : Persentase PDRB sektor industri terhadap total PDRB Formulasi : Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Industri / Jumlah Total PDRB x 100%	BPS	BID. PSDI, BID. SP2I, UPTD. P2IPK

Adapun berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dicapai sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran IKU	IKU	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah	1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Penjelasan : Persentase PDRB sektor industri terhadap total PDRB Formulasi :	BPS	BID. PSDI, BID. SP2I, UPTD. P2IPK

			Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Industri / Jumlah Total PDRB x 100%			
2	Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah	2	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	<p>Penjelasan :</p> <p>Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kabupaten/Kota di dalam Satu Provinsi</p> <p>Formulasi :</p> $(KVH(\text{barang 1}) + KVH(\text{barang2}) + KVH(\text{barang}_n)) / \text{jumlah bapokting}$	Data Pemantauan harga Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	BID. DAGRI, UPTD. PSMB, UPTD. P2K
3	Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	3	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	<p>Penjelasan :</p> <p>Ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Nilai positif dari ekspor bersih (surplus perdagangan) dan Nilai negatif ekspor neto (defisit perdagangan)</p> <p>Formulasi</p> <p>Nilai Ekspor Bersih = Nilai Ekspor - nilai impor</p>	BPS	BID. DAGLU
		4	Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)	<p>Penjelasan :</p> <p>Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi.</p> <p>Formulasi</p> $\text{Ekspor Barang dan Jasa} = \frac{\text{Total Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$	BPS	BID. DAGLU
4	Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas	5	Nilai ekspor produksi industry non-migas (Juta USD)	<p>Penjelasan :</p> <p>Nilai ekspor produksi industry non-migas merupakan nilai ekspor produksi industry pengolahan non-migas</p> <p>Formulasi :</p> $\text{Nilai ekspor produksi industry non-migas} = \text{Nilai Ekspor Industri Pengolahan} - \text{Nilai Ekspor Industri Pengolahan Migas}$	BPS	BID. SP2I
5	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industry	6	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	<p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industry</p> <p>Formulasi :</p> <p>Jumlah tenaga kerja di sektor industry hasil Survey SAKERNAS</p>	BPS (SAKERNAS)	BID. PSDI
6	Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	7	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)	<p>Penjelasan :</p> <p>Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.</p> <p>Formulasi :</p>	Data Hasil Rekon Industri Bid. SP2I	BID. PSDI, BID. SP2I, UPTD. P2IPK

			Proporsi IKM = Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah / Total Jumlah Unit Industri	
--	--	--	---	--

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut :

➤ RENSTRA 2021-2026

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran IKU	IKU	Target
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah	1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)	7,07
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	2 Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)	11.949,06
3	Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah	3 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	7,20
4	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	41,45

➤ RENSTRA 2025-2029

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran IKU	IKU	Target
1	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	40,97-41,45
2	Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	11,1
3	Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	11.041,52
		Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)	90,74 - 92,16
4	Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas	Nilai ekspor produksi industry non-migas (Juta USD)	18.398,59
5	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industry	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Orang)	135.417,00
6	Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)	1,31

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah disusun sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi informasi mengenai rencana kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2025, pencapaian kinerja atau realisasi pencapaian sasaran dan analisis terhadap pencapaian masing-masing sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja pada Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2025 mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2025, Rencana Kerja Tahun 2025, Renstra Tahun 2021-2026, dan Renstra Tahun 2025-2029.

Pengukuran kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	Hijau Tua
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Kuning Tua
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Kuning Muda
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Merah

➤ **RENSTRA 2021-2026**

Tabel 3.2

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berdasarkan RENSTRA Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Realisasi Kinerja 2025			Kategori	Sumber Data
							Target	Realisasi**	Capaian*		
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah	1	Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)	%	7,07	5,12	72,42	Sedang	BPS diolah kembali oleh Perindag
		2	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	2	Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)	Juta USD	11.949,06	11.003,93	92,09	Sangat Tinggi	BPS diolah kembali oleh Perindag
		3	Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah	3	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	%	7,2	5,9	118,06	Sangat Tinggi	Data Pemantauan Harga Bid DAGRI
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	4	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	%	41,45	41,24	99,49	Sangat Tinggi	BPS diolah kembali oleh Perindag

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

➤ **RENSTRA 2025-2029**

Tabel 3.3

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2025			Kategori	Sumber Data		
					Target	Realisasi**	Capaian*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)		1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	40,97-41,45	41,24	99,49	Sangat Tinggi	BPS diolah kembali oleh Perindag		
		1	Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah	2	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	%	11,10	5,90	146,85	Sangat Tinggi	Data Pemantauan Harga Bid DAGRI
		2	Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	3	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	Juta USD	11.041,52	11.003,93	99,66	Sangat Tinggi	BPS diolah kembali oleh Perindag
				4	Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)	%	90,74 - 92,16	132,25	143,50	Sangat Tinggi	BPS diolah kembali oleh Perindag
		3	Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas	5	Nilai ekspor produksi industri non-migas (Juta USD)	Juta USD	18.398,59	19.325,87	105,04	Sangat Tinggi	BPS diolah kembali oleh Perindag
		4	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industry	6	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Orang)	Orang	135.417,00	137.860	101,80	Sangat Tinggi	BPS diolah kembali oleh Perindag
		5	Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	7	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)	%	1,31	2,32	177,10	Sangat Tinggi	Data Rekon Bid. Industri

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 yang tertera sebagai berikut :

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif sepanjang tahun 2025. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Nilai capaian kinerja 100 persen atau lebih menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah terpenuhi, sedangkan nilai capaian kinerja dibawah 100 persen menunjukkan bahwa target dalam Perjanjian Kinerja belum terpenuhi, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam proses perencanaan selanjutnya. Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2025 menggunakan 2 metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing.

Rumus 1:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 1 digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin besar nilainya. Sebaliknya, rumus 2 digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin kecil nilainya. Persentase capaian kinerja diharapkan sesuai dengan (atau melebihi) prediksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

➤ **RENSTRA 2021-2026**

Tabel 3.4

Target dan Realisasi PERINDAG Sulteng Tahun 2025

berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi**	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah	Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)	7,07	5,12	72,42
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)	11.949,06	11.003,93	92,09
3	Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	7,2	5,9	118,06
4	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	41,45	41,24	99,49

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag, 2025 * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Analisis capaian kinerja per tujuan/sasaran strategis (SS) tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

SS 1 : Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah

1. IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)

IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)

Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%) menunjukkan pertumbuhan riil ekonomi sektor Perdagangan tanpa pengaruh perubahan harga. Tahun 2025 indikator Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan tidak tercapai. Target yang ditetapkan 7,07% dan terealisasi sebesar 5,12% dengan tingkat capaian sebesar 72,42%. Penurunan laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor perdagangan merupakan salah satu indikasi adanya perlambatan aktivitas ekonomi riil yang berkaitan erat dengan dinamika konsumsi masyarakat, distribusi barang, serta stabilitas perekonomian daerah data yang digunakan merupakan data rilis BPS dalam Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan IV-2025, yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

SS 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih

2. IKU 2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah atau negara yang dinyatakan dalam juta dolar Amerika

Serikat (USD). Tahun 2025 indikator Nilai Ekspor Bersih tidak tercapai memiliki target yang ditetapkan 11.949,06 Juta USD dan terealisasi sebesar 11.003,93 Juta USD dengan tingkat capaian sebesar 92,09%. Secara umum capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Tingginya ekspor bersih di Sulawesi Tengah terutama disebabkan oleh besarnya nilai ekspor komoditas tambang dan industri pengolahan, khususnya nikel, yang jauh melampaui nilai impor.

Adapun Laporan Ekspor tahun 2025 berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat perkembangannya pada tabel Kinerja Ekspor Daerah tahun 2025 berikut:

Tabel 3.5
Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2025 (US\$ Juta)

BULAN	BPS		
	NILAI EKSPOR	NILAI IMPOR	NILAI EKSPOR BERSIH
	JUTA US\$	JUTA US\$	JUTA US\$
JANUARI	1.709,61	616,15	1.093,46
FEBRUARI	1.515,99	1.231,19	284,80
MARET	1.870,51	783,50	1.087,01
APRIL	1.612,54	943,37	669,17
MEI	1.968,45	863,07	1.105,38
JUNI	1.750,61	1.119,84	630,77
JULI	1.635,79	916,79	719,00
AGUSTUS	1.938,36	805,92	1.132,44
SEPTEMBER	2.091,75	1.064,33	1.027,42
OKTOBER	2.169,74	1.019,06	1.150,68
NOPEMBER	1.756,53	847,73	908,80
DESEMBER	2.339,60	1.101,58	1.238,02
TOTAL	22.316,46	11.312,53	11.003,93

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag, 2025

SS 3 : Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di sulawesi Tengah Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

3. IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) menunjukkan tingkat perbedaan (disparitas) harga barang dan/atau jasa antar kabupaten/kota

dalam satu provinsi. Koefisien variasi (KV) dihitung dari perbandingan simpangan baku harga terhadap rata-rata harga, lalu dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa merata harga antarwilayah. Tahun 2025, target yang ditetapkan 7,2 % dan terealisasi sebesar 5,9% dengan tingkat capaian sebesar 81,94%. Koefisien variasi harga antarwilayah sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan pemerataan harga antar daerah di tingkat provinsi masih tergolong baik, meskipun masih terdapat perbedaan harga kecil yang bersifat normal akibat faktor geografis dan biaya distribusi.

SS 4 : Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas

4. IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)

41,24 % dari 41,45 % yang ditargetkan menunjukkan bahwa perekonomian daerah ini sangat bergantung pada aktivitas industri, khususnya industri pengolahan non-migas. Tingginya kontribusi sektor ini mencerminkan peran strategis industri pengolahan sebagai penggerak utama perekonomian daerah, baik dari sisi penciptaan nilai tambah maupun penyerapan tenaga kerja. Kuatnya peran industri pengolahan juga mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Sulawesi Tengah telah bergerak menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam, terutama melalui pengolahan hasil pertambangan dan komoditas primer. Namun demikian, dominasi yang terlalu besar pada satu sektor juga berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi apabila terjadi perlambatan produksi atau fluktuasi harga komoditas. Capaian sebesar 99,49% menunjukkan bahwa indikator ini hampir memenuhi target dan secara umum dapat dikategorikan sebagai kinerja sangat baik. Selisih yang terjadi relatif kecil dan tidak menunjukkan deviasi signifikan dari perencanaan. Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting dalam menilai Struktur ekonomi daerah, Tingkat industrialisasi dan Ketahanan ekonomi non-berbasis sumber daya alam. Beberapa kemungkinan penyebab tidak tercapainya target secara penuh antara lain :

- Perlambatan pertumbuhan subsektor industri tertentu
- Fluktuasi harga bahan baku atau energi

- Gangguan rantai pasok
- Penurunan permintaan domestik/ekspor
- Pertumbuhan sektor lain yang lebih tinggi sehingga menurunkan proporsi kontribusi industri pengolahan

➤ **RENSTRA 2025-2029**

Tabel 3.6

Target dan Realisasi PERINDAG Sulteng Tahun 2025
berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi**	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	40,97-41,45	41,24	99,49
2	Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	11,10	5,90	146,85
3	Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	11.041,52	11.003,93	99,66
		Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)	90,74 - 92,16	132,25	143,50
4	Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas	Nilai ekspor produksi industry non-migas (Juta USD)	18.398,59	19.325,87	105,04
5	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industry	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Orang)	135.417,00	137.860	101,80
6	Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)	1,31	2,32	177,10

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag, 2025 * Angka sementara **Angka Sangat Sementara
Analisis capaian kinerja per tujuan/sasaran strategis (SS) tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)

1. IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) menunjukkan seberapa besar kontribusi industri pengolahan dalam membentuk PDRB daerah, yang mencerminkan tingkat industrialisasi dan kekuatan sektor manufaktur dalam perekonomian. Rasio PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah yang mencapai 41,24 persen menunjukkan bahwa struktur perekonomian provinsi ini sangat didominasi oleh sektor industri, khususnya industri berbasis pengolahan sumber daya alam. Dari range 40,97-41,45 yang ditargetkan dengan realisasi 41,24 % atau 99,49 %, angka ini berarti hampir setengah aktivitas ekonomi Sulawesi

Tengah berasal dari industri pengolahan. Dibandingkan banyak provinsi lain di Indonesia, rasio ini tergolong sangat tinggi, sehingga Sulawesi Tengah dapat dikategorikan sebagai daerah dengan industrial-led economy, bukan lagi berbasis pertanian atau jasa. Tingginya rasio ini terutama dipengaruhi oleh industri pengolahan logam dasar, khususnya nikel. Keberadaan kawasan industri besar seperti IMIP Morowali, Kebijakan hilirisasi mineral yang mendorong pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi dan masuknya investasi besar, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA). Karena target ditetapkan dalam bentuk interval (range), maka capaian 41,24% dapat dinyatakan : Memenuhi target kinerja, Berada mendekati batas atas rentang (upper bound), Mengindikasikan performa yang optimal dalam koridor perencanaan. Jika dihitung terhadap nilai tengah rentang (41,21%), maka realisasi sedikit lebih tinggi (+0,03 poin persentase), menunjukkan kecenderungan kinerja yang stabil dan positif.

Tabel 3.7

Tabel Kawasan Industri dan Tenant di Sulawesi Tengah

No	Nama Kawasan Industri	Lokasi	Status
1	PT. AMUGRAH SAMALAGI INDUSTRIAL PARK (ASIP)	KAB. MOROWALI	SWASTA
2	ENAM SEMBILAM KAWASAM INDUSTRI (ESKI)	KAB. MOROWALI UTARA	SWASTA
3	INDONESIA HUABAO INDUSTRIAL PARK	KAB. MOROWALI	SWASTA
4	KAWASAN INDUSTRI MOROWALI	KAB. MOROWALI	SWASTA
5	KAWASAN INDUSTRI PALU	KOTA PALU	SWASTA
6	KAWASAN INDUSTRI STARDUST	KAB. MOROWALI UTARA	SWASTA
7	NEO ENERGY MOROWALI INDUSTRIAL ESTATE (NEMIE)	KAB. MOROWALI	SWASTA
8	NEO ENERGY PARIMO INDUSTRIAN ESTATE	KAB. PARIGI MOUTONG	SWASTA
9	QINGDAO INDONESIA INDUSTRIAL PARK	KAB. MOROWALI	SWASTA

Sumber : Bidang SP2I, Dinas Perindag, 2025

SS 1 : Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

2. IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) menunjukkan tingkat perbedaan (disparitas) harga barang dan/atau jasa antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Koefisien variasi (KV) dihitung dari perbandingan simpangan baku harga terhadap rata-rata harga, lalu dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa merata harga antarwilayah. Tahun 2025, target yang ditetapkan 11,10% dan terealisasi sebesar 5,9% dengan tingkat capaian sebesar 146,85%. Koefisien variasi harga antarwilayah sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan pemerataan harga antar daerah di tingkat provinsi masih tergolong baik, meskipun masih terdapat perbedaan harga kecil yang bersifat normal akibat faktor geografis dan biaya distribusi.

Selama tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan pasar murah / operasi pasar sebanyak 20 kali dalam rangka stabilitas harga dan ketersediaan stok BAPOKTING di Provinsi, Kabupaten/Kota, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada saat terjadinya kelangkaan.

Tabel 3.8
Rekapitulasi Pelaksanaan Pasar Murah / Operasi Pasar Tahun 2025

No.	Pasar Murah / Operasi Pasar	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Nilai Subsidi	Nilai Transaksi
1	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi Daerah Sulawesi Tengah serta menjelang Perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Menyambut bulan Suci Ramadhan	Lapangan Sepak Bola Kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu	26 - 27 Februari	58.100.000	363.800.200
2	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi Daerah Sulawesi Tengah serta menjelang Perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Menyambut Idul Fitri 1 syawal 1446 H Tahun 2025	Lapangan Sepak Bola Telkom	18 -19 Maret 2025	67.050.000	344.114.000
3	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi Tengah	Desa Pangalasiang Kab. Donggala	30 April – 1 Mei 2025	15.100.000	64.500.000
4	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi Daerah Sulawesi Tengah serta menjelang Perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional	Jl. Diponegoro (Halaman Kosong Depan Kampus UNISA)	03 – 04 Juni 2025	72.580.000	416.836.000

	(HBKN) Menyambut Idul Adha 1446 H				
5	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan STQH Ke XXVII Penanganan dan Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi Tengah	Lapangan Voli Sintuvu Maroso Kab. Poso	24 – 25 Juni 2025	22.374.000	177.419.000
6	Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke 79 tahun 2025 dan Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Halaman Kantor POLDA SULTENG	03 Juli 2025	20.064.000	177.419.000
7	Dalam rangka Pelaksanaan Program Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (TETRA PANDU), Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Harga	Desa Binaa dan Desa Binaa Barat Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong	06 – 08 Agustus 2025	18.1850.000	112.850.000
8	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi Tengah	Mako Lanal, Kel. Sidoarjo dan Mangala Kodim 1305BT, Kel. Baru, Kec. Baolan Kab. Toli-toli	11 – 12 September 2025	36.000.000	241.300.000
9	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi Tengah	Pasar Tani Kec. Luwuk Kab. Banggai	17 – 18 September 2025	50.800.000	266.769.000
10	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi Tengah	Halaman Gedung Morokoa Kec. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara	24 – 25 September 2025	44.150.000	196.350.000
11	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi Tengah	Alun-alun Desa Matansala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali	8 – 9 Oktober 2025	44.400.000	225.700.000
12	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi Tengah	Halaman Kantor Kec. Ampana Kota dan Halaman Kantor Kelurahan Dondo Barat Kec. Ratulindo Kab. Tojo Una-una	29 – 30 Oktober 2025	60.250.000	231.250.000
13	Dalam rangka Pelaksanaan Program Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (TETRA PANDU), Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Harga	Desa Malino dan Desa Onggulara Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala	02 – 04 September 2025	18.100.000	67.500.000
14	Dalam rangka Pelaksanaan Program Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (TETRA PANDU), Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Harga	Halaman Puskesmas Pembantu Kel. Tipo Kec. Palu Barat Kota Palu	04 – 05 November 2025	41.400.000	194.750.000
15	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi Tengah	Kantor Camat Parigi Barat dan Kantor Desa Baliara Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong	06 -07 November 2025	38.900.000	156.900.000
16	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi Tengah	RTH Taiganja Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab.	11 – 12 November 2025	40.000.000	156.900.000

		Sigi			
17	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi Tengah	Halaman Kantor Camat Siniu, Kecamatan Siniu, Kab. Parigi Moutong	13 – 14 November 2025	38.900.000	130.750.000
18	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi Tengah	Balai Desa Tompodau dan Halaman Kantor Camat Tinangkung Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan	19 – 20 November 2025	39.640.000	129.870.000
19	Dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi Tengah	Desa Lokotoy Kec. Banggai Utara dan area Pelabuhan Kontainer Kec. Banggai Kab. Banggai laut	19 – 20 November 2025	39.640.000	129.870.000
20	Dalam Rangka HUT KORPRI Ke 54, HBKN Natal 2025 dan tahun Baru 2026 serta Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi Tengah	Halaman Parkir Restaurant Mary Glow Kel. Lolu selatan Kec. Palu selatan Kota Palu	09 -10 Desember 2025	80.935.000	300.165.000

Sumber : Bid. DAGRI Disperindag, 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah juga melaksanakan pemantauan harga BAPOKTING, berikut rekapitulasi hasil pemantauan harga beberapa komoditi pantauan selama Tahun 2025 :

Tabel 3.9 Perkembangan Tingkat Harga Rata-Rata Sulawesi Tengah dan Koefisien Variasinya dengan Menggunakan Pembobotan (Januari – Desember 2025)

Komoditi	Tahun 2025												Standar Deviasi (a)	Rata2 2025 (b)	KV (c = a/b x 100%)	Bobot (d)	KV x Bobot (e = c x d)
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember					
Beras Medium	13.257	13.475	13.582	13.439	13.177	13.700	15.022	15.602	15.117	14.396	13.635	13.571	821,1	13.998	5,9	3,80	22,3
Kedelai	14.000	13.758	13.807	14.333	14.333	14.333	14.246	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	198,7	14.068	1,4	0,36	0,5
Cabe Merah Keriting	34.619	39.071	45.687	49.078	56.039	51.734	50.121	41.664	41.551	37.287	36.046	37.386	7.017,6	43.357	16,2	0,53	8,6
Cabe Rawit Merah	60.375	56.150	75.095	69.284	62.102	59.593	71.656	50.420	48.151	42.413	33.744	52.785	12.175,1	56.814	21,4	0,16	3,4
Bawang Merah	40.626	37.067	42.794	45.111	40.891	47.024	50.775	58.481	50.062	42.829	40.521	51.997	6.155,5	45.682	13,5	0,50	6,8
Daging Ayam Ras	37.584	36.418	36.574	36.067	34.947	35.335	34.172	33.358	34.401	35.219	35.467	37.714	1.328,1	35.605	3,7	1,31	4,9
Daging Sapi	133.269	133.269	133.630	134.599	134.936	135.123	134.808	134.808	134.808	134.457	134.423	134.557	641,6	134.391	0,5	0,65	0,3
Telur Ayam Ras	31.280	31.267	31.633	31.672	31.345	31.018	30.679	30.857	31.559	31.909	31.413	31.917	389,7	31.379	1,2	0,76	0,9
Ikan Kembung	30.583	30.688	31.132	33.750	32.485	29.333	30.054	31.583	31.750	31.069	30.833	32.857	1.232,2	31.343	3,9	0,32	1,3
Minyak Goreng (MGR)	17.144	16.612	16.613	16.450	16.672	16.901	16.923	16.691	16.994	17.079	17.230	17.178	259,8	16.874	1,5	0,81	1,2
Tepung Terigu	13.860	13.859	14.116	13.893	13.905	13.916	13.893	13.886	13.879	13.915	13.884	13.824	72,1	13.903	0,5	0,04	0,0
Gula Pasir	19.083	19.242	19.384	19.422	19.452	19.517	19.282	19.019	18.976	18.960	18.843	18.730	259,1	19.159	1,4	0,40	0,5
Total															71,2	9,7	50,86
Koefisien Antar Wilayah															5,9		
Koefisien antar waktu, KV Bapok = (Σe / Σd)																	5,3

Sumber : Bid. DAGRI Disperindag, 2025

Dari data diatas dapat diketahui bahwa untuk komoditi seperti Cabe Merah Keriting, dan Cabe Rawit memiliki nilai Koefisien Variasi > 15% hal ini dikarenakan selama tahun 2025 harga dari 2 komoditi tersebut cenderung berfluktuatif antar waktu dan wilayah. Koefisien Variasi sendiri adalah perbandingan Simpangan Baku (Standar Deviasi) dengan Rata-rata Hitung dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Kegunaan koefisien variasi adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin homogen (seragam), sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen (bervariasi).

SS 2 : Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa

3. IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah atau negara yang dinyatakan dalam juta dolar Amerika Serikat (USD). Tahun 2025 indikator Nilai Ekspor Bersih target yang ditetapkan 11.041,52 Juta USD dan terealisasi sebesar 11.003,93 Juta USD dengan tingkat capaian sebesar 99,66%. Namun secara umum capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Tingginya ekspor bersih di Sulawesi Tengah terutama disebabkan oleh besarnya nilai ekspor komoditas tambang dan industri pengolahan, khususnya nikel, yang jauh melampaui nilai impor.

Selama Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan aktif melaksanakan kegiatan promosi untuk meningkatkan citra produk potensi ekspor.

Tabel 3.10

Kegiatan Pameran Tahun 2025

NO	NAMA KEGIATAN/ PAMERAN	JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIFASILITASI	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI TRANSAKSI
1	Pameran Semarak Sulteng Nambaso	3	Lapangan Immanuel, Jl. Prof. Moh. Yamin	19 April - 12 Mei 2025	64.214.000,00
2	Pameran Sulteng Coffee Festival	28	Atrium PGM Palu	18 - 19 Oktober 2025	25.228.000,00
3	Pameran Trade Expo Indonesia	3	ICE BSD Tangerang	15 - 19 Oktober 2025	47.971.000,00
4	Festival Teluk Tomini	13	Pantai Kayubura (Eks. Sail Tomini) Parigi Moutong	21 November - 23 November 2025	28.200.000,00

Sumber : Bid. DAGLU. Disperindag, 2025

4. IKU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)

Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) menunjukkan seberapa besar kontribusi ekspor barang dan jasa dalam membentuk PDRB daerah, yang mencerminkan orientasi ekspor dan keterkaitan ekonomi daerah dengan pasar luar. Tahun 2025 indikator Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) tercapai. Target yang ditetapkan 90,74 - 92,16 % dan terealisasi sebesar 128,48% dengan tingkat capaian sebesar 143,50%. Capaian yang tinggi ini menggambarkan tingkat keterbukaan ekonomi daerah terhadap pasar luar (luar provinsi maupun luar negeri), yang mana semakin tinggi persentasenya, semakin besar ketergantungan dan kontribusi kegiatan ekspor dalam mendorong perekonomian daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2025 menerbitkan 7.698 SKA. Berikut perbandingan Nilai Ekspor berdasarkan data BPS terhadap SKA yang diterbitkan oleh IPSKA yang berkedudukan.

Tabel 3.11

Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2025 (US\$ Juta) terhadap SKA

BULAN	BPS			SKA	
	NILAI EKSPOR	NILAI IMPOR	NILAI EKSPOR BERSIH	FOB	VOLUME
	JUTA US\$	JUTA US\$	JUTA US\$	JUTA US\$	TON
JANUARI	1.709,61	616,15	1.093,46	826,98	38.363.888,17
FEBRUARI	1.515,99	1.231,19	284,80	954,58	86.509.755,31
MARET	1.870,51	783,50	1.087,01	786,39	43.356.057,98
APRIL	1.612,54	943,37	669,17	1.013,50	75.886.668,50
MEI	1.968,45	863,07	1.105,38	1.023,91	71.674.866,93
JUNI	1.750,61	1.119,84	630,77	1.050,56	50.178.247,11
JULI	1.635,79	916,79	719,00	858,03	50.969.944,86
AGUSTUS	1.938,36	805,92	1.132,44	867,98	37.266.231,73
SEPTEMBER	2.091,75	1.064,33	1.027,42	1.082,36	46.549.913,83
OKTOBER	2.169,74	1.019,06	1.150,68	957,02	34.049.063,93
NOPEMBER	1.756,53	847,73	908,80	896,28	46.435.166,59
DESEMBER	2.339,60	1.101,58	1.238,02	980,95	104.693.626,72
TOTAL	22.316,46	11.312,53	11.003,93	11.298,53	685.933.431,66

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag, 2025

SS 3 : Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas

5. IKU 5 Nilai ekspor produksi industri non-migas (Juta USD)

Realisasi nilai ekspor produksi industri non-migas Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 19.325,87 juta USD dari 18.398,59 USD yang ditargetkan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,04 %, capaian ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor yang sangat kuat dan berperan signifikan dalam mendorong perekonomian daerah. Capaian ini mencerminkan tingginya kontribusi sektor industri pengolahan non-migas, khususnya industri berbasis sumber daya alam. Tingginya nilai ekspor tersebut terutama didukung oleh industri pengolahan logam dan mineral, sejalan dengan berkembangnya kawasan industri dan aktivitas hilirisasi di Sulawesi Tengah. Permintaan global yang relatif stabil terhadap produk industri non-migas turut memperkuat kinerja ekspor daerah. Nilai ekspor industri non-migas merupakan indikator penting dalam menilai :

- Daya saing produk industri di pasar global
- Kinerja hilirisasi dan nilai tambah industri
- Ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi komoditas migas
- Kontribusi terhadap devisa daerah/nasional

Beberapa kemungkinan faktor yang mendorong capaian melampaui target antara lain :

- Peningkatan permintaan global terhadap produk industri non-migas
- Ekspansi pasar ekspor baru
- Peningkatan kapasitas dan produktivitas industri
- Stabilitas harga komoditas manufaktur di pasar internasional
- Kebijakan fasilitasi ekspor dan kemudahan perizinan

Capaian ini menunjukkan bahwa : Strategi penguatan industri berorientasi ekspor berjalan efektif, Program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah memberikan dampak nyata, Perencanaan target cukup konservatif dan berpotensi ditingkatkan pada periode berikutnya. Namun demikian, perlu diantisipasi risiko eksternal seperti : Perlambatan ekonomi global, Kebijakan proteksionisme negara tujuan ekspor dan Fluktuasi nilai tukar.

Tabel 3.12

Rekapitulasi Nilai Ekspor Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2025

Golongan Barang (HS 2 Digit)	Nilai FOB (Juta USD)* Desember
Bahan Bakar Mineral	2.819,43
Bahan Kimia Anorganik	566,90
Berbagai Produk Kimia	22,29
Besi dan Baja	13.682,25
Buah-Buahan	124,10
Lemak dan Minyak Hewan	7,84
Logam Dasar lainnya	118,83
Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian	
Pupuk	12,30
Nikel	3.703,22
Aluminium	1.212,24
Golongan Barang Lainnya	47,05
Jumlah	22.316,45
Nilai Ekspor Migas	2.819,43
Nilai Ekspor Industri Pengolahan (Non Migas)	19.325,87

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag, 2025

SS 4 : Meningkatnya tenaga kerja di sektor industry

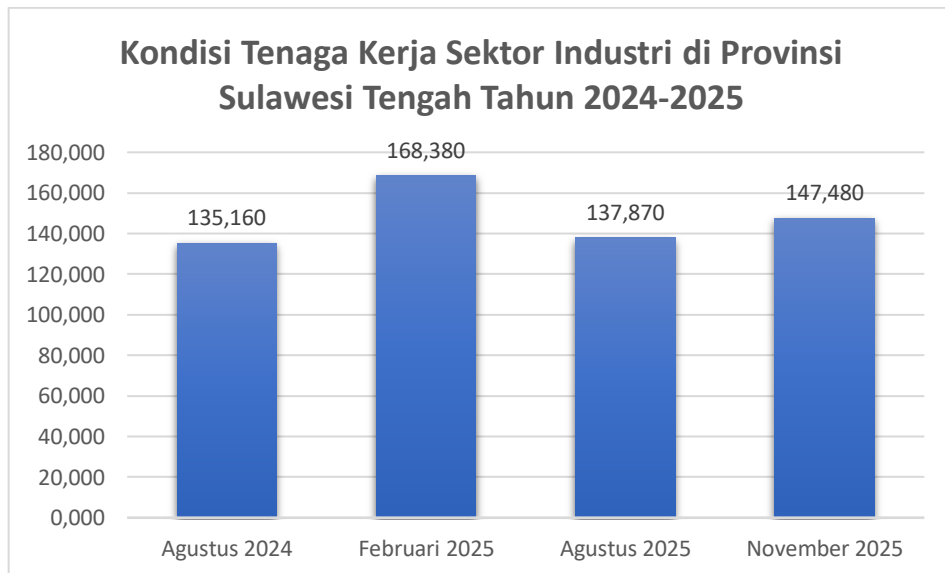
6. IKU 6 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Orang)

Sejalan dengan peningkatan kinerja ekspor, jumlah tenaga kerja di sektor industri juga menunjukkan kinerja positif. Realisasi tenaga kerja sektor industri mencapai realisasi sebesar 137.860 orang dari target 135.417 orang, dengan tingkat capaian sebesar 101,80 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekspor industri non-migas turut berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di daerah. Peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut mencerminkan pertumbuhan aktivitas industri, khususnya industri pengolahan, yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya investasi dan operasional kawasan industri di Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian daerah. Jumlah tenaga kerja di sektor industri merupakan indikator penting yang mencerminkan :

- Daya serap sektor industri terhadap angkatan kerja
- Perluasan kesempatan kerja formal
- Kontribusi sektor industri terhadap pengurangan pengangguran
- Penguatan struktur ekonomi berbasis manufaktur

Peningkatan penyerapan tenaga kerja ini juga menunjukkan bahwa sektor industri tetap menjadi salah satu penggerak utama dalam pembentukan nilai tambah pada Produk Domestik Regional Bruto. Beberapa faktor yang kemungkinan mendukung capaian ini antara lain :

- Ekspansi kapasitas produksi industri
- Masuknya investasi baru di sektor manufaktur
- Peningkatan permintaan pasar domestik maupun ekspor
- Program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja
- Kebijakan kemudahan berusaha dan insentif industri



Gambar 2 Grafik Kondisi Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024-2025 (Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag, 2025)

SS 5 : Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi

7. IKU 7 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)

Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada level Provinsi Sulawesi Tengah mencapai realisasi sebesar 2,32 persen dari target 1,31 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 177,10 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja indikator melampaui target secara signifikan, sehingga berada pada kategori sangat baik. Tingginya capaian indikator tersebut mencerminkan meningkatnya peran dan kontribusi IKM dalam struktur industri daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan IKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berjalan secara efektif dan mampu mendorong pertumbuhan jumlah IKM di tingkat provinsi. Peningkatan proporsi IKM juga berkontribusi dalam memperluas basis ekonomi daerah serta mendukung penciptaan lapangan kerja. Keberadaan IKM yang semakin berkembang turut memperkuat rantai pasok industri, termasuk sebagai pendukung industri skala besar dan sektor industri pengolahan non-migas.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran strategis dalam :

- Pemerataan pembangunan ekonomi
- Penciptaan lapangan kerja skala lokal
- Penguatan ekonomi berbasis komunitas
- Peningkatan nilai tambah sektor manufaktur

Peningkatan proporsi IKM di tingkat provinsi juga memperkuat struktur ekonomi daerah dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto, khususnya pada sektor industri pengolahan skala kecil dan menengah. Beberapa faktor yang kemungkinan mendukung capaian tinggi ini antara lain :

- Program pembinaan dan fasilitasi IKM yang efektif
- Kemudahan perizinan dan legalisasi usaha
- Akses pembiayaan yang lebih luas
- Digitalisasi pemasaran dan perluasan pasar
- Peningkatan minat kewirausahaan masyarakat

Capaian yang jauh melampaui target menunjukkan bahwa : Intervensi kebijakan berjalan sangat efektif, Ekosistem pengembangan IKM semakin kondusif, Target awal kemungkinan ditetapkan cukup konservatif. Namun demikian, perlu evaluasi lebih lanjut untuk memastikan : Keberlanjutan usaha IKM yang

baru tumbuh, Kualitas dan daya saing produk IKM, Kontribusi riil terhadap output industri dan penyerapan tenaga kerja.

B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

➤ RENSTRA 2021-2026

Tabel 3.13
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (RENSTRA 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi*	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah	Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)	na	5,76	na	na	5,55	na	7,07	5,12	72,42
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)	9.525,71	10.222,21	107,31	10.668,80	10.540,85	98,80	11.949,06	11.003,93	92,09
3	Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	na		na	na	7,4	na	7,2	5,9	118,06
4	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	32,00	37,19	116,22	41,00	37,08	90,44	41,45	41,24	99,49

Analisis capaian kinerja per tujuan/sasaran strategis (SS) tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

SS 1 : Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah

1. IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)

IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)

Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%) menunjukkan pertumbuhan riil ekonomi sektor Perdagangan tanpa pengaruh perubahan harga.

Tahun 2025 indikator Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan tidak tercapai. Target yang ditetapkan 7,07% dan terealisasi sebesar 5,12% dengan tingkat capaian sebesar 72,42%. Berdasarkan data dari tahun 2024 dan 2025 laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor Perdagangan di Sulawesi Tengah

mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa PDRB ADHK sektor Perdagangan masih bertumbuh, tetapi lajunya sedikit melambat. Hal ini dapat disebabkan adanya penyesuaian daya beli masyarakat, stabilisasi permintaan setelah pertumbuhan tinggi sebelumnya, atau faktor musiman dan struktural.

SS 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih

2. IKU 2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah atau negara yang dinyatakan dalam juta dolar Amerika Serikat (USD). Tahun 2025 indikator Nilai Ekspor Bersih tidak tercapai. Target yang ditetapkan 11.949,06 Juta USD dan terealisasi sebesar 11.003,93 Juta USD dengan tingkat capaian sebesar 92,09%. Namun secara umum capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Tingginya ekspor bersih di Sulawesi Tengah terutama disebabkan oleh besarnya nilai ekspor komoditas tambang dan industri pengolahan, khususnya nikel, yang jauh melampaui nilai impor. Berdasarkan data dari tahun sebelumnya Nilai ekspor bersih Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025, menunjukkan bahwa ekspor daerah tumbuh lebih tinggi dibanding impor. Hal ini mencerminkan daya saing produk unggulan daerah yang semakin kuat di pasar global. Namun, pertumbuhan ini masih didominasi oleh komoditas hasil pertambangan.

SS 3 : Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

3. IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) menunjukkan tingkat perbedaan (disparitas) harga barang dan/atau jasa antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Koefisien variasi (KV) dihitung dari perbandingan simpangan baku harga terhadap rata-rata harga, lalu dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa merata harga antarwilayah. Tahun 2025, target yang ditetapkan 7,2 % dan terealisasi sebesar 5,9% dengan tingkat capaian sebesar 118,06%. Koefisien variasi harga antarwilayah sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan pemerataan harga

antar daerah di tingkat provinsi masih tergolong baik, meskipun masih terdapat perbedaan harga kecil yang bersifat normal akibat faktor geografis dan biaya distribusi. Penurunan Koefisien Variasi harga antarwilayah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan telah berkurangnya disparitas harga antar kabupaten/kota, yang mencerminkan semakin meratanya distribusi barang dan meningkatnya stabilitas harga di tingkat provinsi. Hal ini didukung dengan adanya operasi pasar dan pasar murah yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025.

SS 4 : Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas

4. IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)

Pada Tahun 2025, indikator kinerja Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) menunjukkan perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan capaian Tahun 2024. Penetapan target Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta arah kebijakan pembangunan sektor industri yang menitikberatkan pada penguatan industri pengolahan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Target Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) pada Tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024. Peningkatan target tersebut mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas, seiring dengan meningkatnya aktivitas produksi industri, penguatan hilirisasi industri, serta membaiknya iklim investasi dan permintaan pasar.

Target tahun 2025 sedikit meningkat dari 41,00% menjadi 41,45% (+0,45 poin), menunjukkan optimisme perencanaan. Realisasi yang mampu mendekati target tersebut menunjukkan : Strategi penguatan industri lebih efektif dibanding tahun sebelumnya, Kondisi ekonomi dan industri lebih stabil dan Kebijakan hilirisasi dan pengembangan industri memberikan dampak nyata. Perbandingan dua tahun menunjukkan :

- Tahun 2024 mengalami deviasi cukup besar terhadap target
- Tahun 2025 menunjukkan pemulihan kuat (strong rebound)
- Struktur ekonomi kembali menguat pada sektor industri pengolahan non migas

Kenaikan 4,16 poin persentase dalam satu tahun merupakan peningkatan yang signifikan dan mencerminkan keberhasilan intervensi kebijakan.

➤ **RENSTRA 2025-2029**

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan tahun sebelumnya (RENSTRA 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi*	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	na	na	na	na	41,18	na	40,97-41,45	41,24	99,49
2	Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	na	na	na	na	7,4	na	11,10	5,90	146,85
3	Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	na	na	na	na	10.540,90	na	11.041,52	11.003,93	99,66
		Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)	na	na	na	na	159,47	na	90,74 - 92,16	132,25	143,50
4	Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas	Nilai ekspor produksi industri non-migas (Juta USD)	na	na	na	na	17.828,09	na	18.398,59	19.325,87	105,04
5	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri	Jumlah tenaga kerja di sektor industri (Orang)	na	na	na	na	135.160	na	135.417,00	137.860	101,80
6	Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)	na	na	na	na	1,21	na	1,31	2,32	177,10

Analisis capaian kinerja per tujuan/sasaran strategis (SS) tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)

1. IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Realisasi kinerja pada indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, rasio PDRB industri pengolahan tercatat sebesar 41,18 %, sementara pada tahun 2025 meningkat menjadi 41,24 %. Kenaikan ini mencerminkan semakin menguatnya peran sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Dari sisi perencanaan, target Rasio PDRB Industri Pengolahan tahun 2025 ditetapkan pada rentang 40,97 %–41,45 %. Realisasi

sebesar 41,24 % berarti capaian sangat tinggi, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,49 %.

Peningkatan rasio tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, sehingga kontribusinya terhadap total PDRB semakin besar. Kondisi ini juga mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi industri, peningkatan investasi sektor pengolahan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Tidak terjadi penurunan kontribusi, Terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan, Target 2025 berhasil dikendalikan dalam koridor yang realistis. Hal ini menunjukkan konsistensi kebijakan pembangunan industri dan stabilitas struktur ekonomi daerah.

SS 1 : Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

2. IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) menunjukkan tingkat perbedaan (disparitas) harga barang dan/atau jasa antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Koefisien variasi (KV) dihitung dari perbandingan simpangan baku harga terhadap rata-rata harga, lalu dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa merata harga antarwilayah. Tahun 2025, target yang ditetapkan 11,10% dan terealisasi sebesar 5,9% dengan tingkat capaian sebesar 146,85%. Koefisien variasi harga antarwilayah sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan pemerataan harga antar daerah di tingkat provinsi masih tergolong baik, meskipun masih terdapat perbedaan harga kecil yang bersifat normal akibat faktor geografis dan biaya distribusi. Penurunan Koefisien Variasi harga antarwilayah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan berkurangnya disparitas harga antar kabupaten/kota, yang mencerminkan semakin meratanya distribusi barang dan meningkatnya stabilitas harga di tingkat provinsi.

SS 2 : Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa

3. IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah atau negara yang dinyatakan dalam juta dolar Amerika Serikat (USD). Tahun 2025 indikator Nilai Ekspor Bersih tidak tercapai. Target yang ditetapkan 11.041,52 Juta USD dan terealisasi sebesar 11.003,93 Juta USD atau 99,66%. Namun secara umum capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Tingginya ekspor bersih di Sulawesi Tengah terutama disebabkan oleh besarnya nilai ekspor komoditas tambang dan industri pengolahan, khususnya nikel, yang jauh melampaui nilai impor. Berdasarkan data dari tahun sebelumnya Nilai ekspor bersih Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025, menunjukkan bahwa ekspor daerah tumbuh lebih tinggi dibanding impor. Hal ini mencerminkan daya saing produk unggulan daerah yang semakin kuat di pasar global. Namun, pertumbuhan ini masih didominasi oleh komoditas hasil pertambangan.

4. IKU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)

Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) menunjukkan seberapa besar kontribusi ekspor barang dan jasa dalam membentuk PDRB daerah, yang mencerminkan orientasi ekspor dan keterkaitan ekonomi daerah dengan pasar luar. Tahun 2025 indikator Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) tercapai. Target yang ditetapkan 90,74 - 92,16 % dan terealisasi sebesar 132,25% atau 139,41%. Capaian yang tinggi ini menggambarkan tingkat keterbukaan ekonomi daerah terhadap pasar luar (luar provinsi maupun luar negeri), yang mana semakin tinggi persentasenya, semakin besar ketergantungan dan kontribusi kegiatan ekspor dalam mendorong perekonomian daerah. Berdasarkan data dari tahun 2024 dan 2025 menunjukkan terjadi penurunan Ekspor Barang dan Jasa, kondisi ini belum menunjukkan penurunan dalam kerangka kontribusinya terhadap PDRB (masih tumbuh positif dalam periode yang tersedia). Namun nilai ekspor secara nominal dapat turun pada periode tertentu (bulan ke bulan), serta fluktuatif tergantung kondisi pasar global dan kinerja komoditas ekspor.

SS 3 : Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas

5. IKU 5 Nilai Ekspor Produksi Industri Non-Migas (Juta USD)

Realisasi kinerja pada indikator ini pada tahun 2025 tercatat sebesar 19.325,87 juta USD dengan tingkat capaian kinerja mencapai 105,04 %. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator ini dapat dinilai berjalan secara efektif.

Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi kinerja mengalami peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 2024 realisasi tercatat sebesar 17.828,09 juta USD. Peningkatan nilai realisasi tersebut mengindikasikan adanya penguatan kinerja ekonomi serta meningkatnya kontribusi sektor terkait terhadap perekonomian daerah. Peningkatan nilai ekspor ini mencerminkan :

- Meningkatnya daya saing produk industri non-migas
- Ekspansi pasar ekspor atau peningkatan volume produksi
- Dampak positif kebijakan hilirisasi dan penguatan industri
- Kontribusi lebih besar sektor industri terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan 8,40% dari tahun sebelumnya menunjukkan tren ekspansi yang sehat dan progresif.

SS 4 : Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri

6. IKU 6 Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (Orang)

Realisasi kinerja pada indikator Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri pada tahun 2025 tercatat sebesar 137.860 orang, melampaui target yang ditetapkan sebesar 135.417 orang. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 101,80 %, yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri berjalan dengan baik dan efektif. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi jumlah tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja di sektor industri tercatat lebih rendah, yaitu sebesar 135.160 orang. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini mengindikasikan adanya ekspansi aktivitas industri serta meningkatnya kapasitas produksi dan investasi di sektor industri.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program pembangunan sektor industri dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga kesinambungan pertumbuhan industri agar peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat terus dipertahankan, sekaligus diiringi dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

SS 5 : Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi

7. Realisasi kinerja pada indikator Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Provinsi pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,32 %, melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,31 %. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 177,10 %, yang menunjukkan kinerja sangat tinggi dalam pengembangan dan penguatan sektor IKM di tingkat provinsi. Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi indikator ini pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, proporsi jumlah IKM pada level provinsi hanya mencapai 1,21 %. Peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2025 mencerminkan adanya percepatan pertumbuhan jumlah IKM, baik melalui pembinaan usaha baru maupun peningkatan skala usaha IKM yang telah ada. Dibandingkan tahun 2024, kinerja tahun 2025 menunjukkan : Lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan, Peningkatan keberhasilan intervensi kebijakan, Ekosistem industri kecil dan menengah yang semakin berkembang. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi lanjutan untuk memastikan : Keberlanjutan dan ketahanan usaha IKM, Kualitas dan daya saing produk, Kontribusi riil terhadap penyerapan tenaga kerja dan output industri.

Tabel 3.15

Data Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024 s/d 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (UNIT USAHA)	
		2024	2025
1	PALU	1696	1795
2	SIGI	1254	1312
3	DONGGALA	522	532
4	PARIGI MOUTONG	584	584
5	POSO	1024	1119

6	TOJO UNA UNA	1455	1829
7	BANGGAI	591	679
8	BANGGAI LAUT	1312	1322
9	BANGGAI KEPULAUAN	1360	1384
10	MOROWALI UTARA	440	526
11	MOROWALI	1187	1302
12	TOLI TOLI	940	980
13	BUOL	824	859
Total		13189	14223

Sumber : Bidang SP2I, Dinas Perindag, 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra

➤ RENSTRA 2021-2026

Tabel 3.16
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Terhadap RENSTRA (RENSTRA 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah	Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)	5,12	7,08	72,32
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)	11.003,93	13.382,94	82,22
3	Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	5,9	7,1	116,90
4	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	41,24	42	98,19

SS 1 : Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah

1. IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)

Tingkat kemajuan capaian indikator Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%) tahun 2025 terhadap target akhir Renstra adalah sebesar 72,32%. PDRB ADHK sektor perdagangan masih bernilai positif, namun melihat capaian tahun-tahun sebelumnya ini merupakan salah satu indikasi adanya perlambatan aktivitas ekonomi riil yang berkaitan erat dengan dinamika konsumsi masyarakat, distribusi barang, serta stabilitas perekonomian.

SS 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih

2. IKU 2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Tingkat kemajuan capaian indikator Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) tahun 2025 terealisasi sebesar 82,22%. Secara umum capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi

Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025. Hal ini mencerminkan daya saing produk unggulan daerah yang semakin kuat di pasar global. Namun, pertumbuhan ini masih didominasi oleh komoditas hasil pertambangan.

SS 3 : Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

3. IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Tingkat kemajuan capaian indikator Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) tahun 2025 terealisasi sebesar 116,90%. Koefisien variasi (KV) dihitung dari perbandingan simpangan baku harga terhadap rata-rata harga, lalu dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa merata harga antarwilayah. Koefisien variasi harga antarwilayah sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan pemerataan harga antar daerah di tingkat provinsi masih tergolong baik, meskipun masih terdapat perbedaan harga kecil yang bersifat normal akibat faktor geografis dan biaya distribusi.

SS 4 : Meningkatkan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas

4. IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)

Indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) bertujuan untuk mengukur besarnya peran sektor industri pengolahan non migas dalam struktur perekonomian daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat industrialisasi dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari sektor pengolahan non berbasis migas. Pada tahun 2025, realisasi indikator ini tercatat sebesar 41,24%, sedangkan target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2026 ditetapkan sebesar 42%. Dengan demikian, capaian kinerja hingga tahun 2025 telah mencapai 98,19% dari target akhir Renstra, dengan selisih sebesar 0,76 poin persentase.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja sektor industri pengolahan non migas berada dalam kategori sangat baik dan telah berada pada jalur yang tepat (on track) menuju target akhir periode Renstra. Selisih capaian yang relatif kecil mengindikasikan bahwa target tahun 2026 cukup realistis untuk dicapai, sepanjang pertumbuhan sektor industri tetap terjaga dan tidak terjadi tekanan signifikan terhadap struktur ekonomi daerah.

Peningkatan kontribusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Meningkatkan aktivitas produksi industri pengolahan non migas.
2. Bertambahnya investasi pada sektor industri pengolahan.
3. Penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pelaku industri.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang perlu diantisipasi, seperti fluktuasi kondisi ekonomi global dan nasional, dinamika harga bahan baku, serta daya beli pasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan kebijakan industrialisasi, peningkatan daya saing industri, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Secara keseluruhan, realisasi tahun 2025 menunjukkan progres yang sangat positif dan memberikan keyakinan bahwa target akhir Renstra sebesar 42% pada tahun 2026 dapat tercapai.

➤ **RENSTRA 2025-2029**

Tabel 3.17
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Terhadap RENSTRA (RENSTRA 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,24	47,00-50,99	87,74
2	Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	5,90	10,4	143,27
3	Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	11.003,93	12.850,33	85,63
		Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)	132,25	98,80 – 101,20	133,85
4	Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas	Nilai ekspor produksi industri non-migas (Juta USD)	19.325,87	20.113,29	96,09
5	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industry	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Orang)	137.860	136.445,00	101,04
6	Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)	2,32	2,12	109,43

Analisis capaian kinerja per tujuan/sasaran strategis (SS) tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)

1. IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa rasio PDRB Industri Pengolahan telah mencapai 87,74% dari target akhir Renstra. Capaian ini mencerminkan kemajuan yang signifikan, meskipun secara absolut masih berada di bawah rentang target akhir Renstra. Secara keseluruhan, kinerja indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2025 berada pada kategori baik, dengan tingkat kemajuan yang relatif tinggi. Namun demikian, upaya strategis dan berkelanjutan masih diperlukan agar pertumbuhan sektor industri pengolahan dapat dipacu secara lebih agresif sehingga target akhir Renstra 2025–2029 dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

SS 1 : Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

2. IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Tingkat kemajuan capaian indikator Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi tahun 2025 terealisasi sebesar 143,27%. Secara umum capaian Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari tahun 2023 hingga 2025. Penurunan Koefisien Variasi harga antarwilayah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan berkurangnya disparitas harga antar kabupaten/kota, yang mencerminkan semakin meratanya distribusi barang dan meningkatnya stabilitas harga di tingkat provinsi.

SS 2 : Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa

3. IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Tingkat kemajuan capaian indikator Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) tahun 2025 terealisasi sebesar 85,63%. Secara umum capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025. Hal ini mencerminkan daya saing produk unggulan daerah yang semakin kuat di pasar global. Namun, pertumbuhan ini masih didominasi oleh komoditas hasil pertambangan.

4. IKU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)

Tingkat kemajuan capaian indikator Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) tahun 2025 terealisasi sebesar 133,85%. Kondisi ini menunjukkan menguatnya kinerja ekspor serta meningkatnya permintaan eksternal terhadap produk daerah.

SS 3 : Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas

5. IKU 5 Nilai Ekspor Produksi Industri Non Migas (Juta USD)

Pada tahun 2025, nilai ekspor produksi industri non migas Sulawesi Tengah mencapai realisasi sebesar 19.325,87 juta USD. Sementara itu, target akhir Renstra 2025–2029 ditetapkan sebesar 20.113,29 juta USD. Dengan demikian, tingkat kemajuan kinerja yang telah dicapai adalah 96,09%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor industri non migas pada tahun 2025 sudah sangat mendekati target akhir Renstra, dengan selisih sebesar 787,42 juta USD atau sekitar 3,91% dari target yang ditetapkan. Tingginya tingkat kemajuan ini mengindikasikan bahwa sektor industri non migas di Sulawesi Tengah memiliki kinerja yang sangat baik dan berada pada jalur pencapaian target Renstra.

Meskipun demikian, masih diperlukan upaya penguatan dan keberlanjutan kebijakan, khususnya dalam peningkatan daya saing produk industri, diversifikasi pasar ekspor, serta optimalisasi nilai tambah komoditas unggulan, agar target akhir Renstra 2025–2029 dapat tercapai bahkan berpotensi terlampaui.

SS 4 : Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri

6. IKU 6 Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (Orang)

Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja di sektor industri Provinsi Sulawesi Tengah mencapai realisasi sebesar 137.860 orang. Sementara itu, target akhir Renstra Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 136.445 orang. Dengan demikian, tingkat kemajuan kinerja yang dicapai adalah 101,04%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi jumlah tenaga kerja telah melampaui target akhir Renstra, dengan selisih sebesar 1.415 orang atau 1,04% di atas target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja yang sangat baik di sektor industri, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas industri dan iklim investasi di Sulawesi Tengah. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dan program pengembangan sektor industri yang dilaksanakan telah berjalan efektif dalam

mendorong penciptaan lapangan kerja. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan penyerapan tenaga kerja, sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja industri agar pertumbuhan yang terjadi tetap sejalan dengan arah pembangunan industri jangka menengah daerah.

SS 5 : Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi

7. IKU 7 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)
Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada level provinsi di Sulawesi Tengah tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 2,32%. Sementara itu, target akhir Renstra Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 2,12%. Dengan demikian, tingkat kemajuan kinerja yang dicapai sebesar 109,43%. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target akhir Renstra, dengan selisih sebesar 0,20 poin persentase atau 9,43% di atas target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan dan penguatan peran IKM di tingkat provinsi, baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun kontribusinya terhadap struktur industri daerah. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pembinaan IKM, termasuk fasilitasi perizinan, pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas dan akses pasar. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan IKM, meningkatkan skala usaha dan daya saing produk, serta mendorong IKM agar mampu naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Capaian Nasional / Daerah Lainnya

➤ RENSTRA 2021-2026

Tabel 3.18
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Terhadap Capaian Nasional / Daerah Lainnya (RENSTRA 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Nasional/Daerah Lain	Lebih Tinggi/ Lebih Rendah
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah	Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)	5,12	5,49	(0,37)
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)	11.003,93	41.052,20	(30.048,27)
3	Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	5,9	na	na
4	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	41,24	19,07	22,17

SS 1 : Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah

1. IKU 1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan nasional lebih tinggi dari capaian Sulawesi Tengah, dimana capaian nasional sebesar 5,49 dan capaian Sulawesi Tengah 5,12. Hal ini mencerminkan bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tidak secepat atau sebesar pertumbuhan sektor perdagangan agregat di tingkat nasional pada periode yang sama.

SS 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih

2. IKU 2 Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Nilai Ekspor Bersih nasional lebih tinggi dari capaian Sulawesi Tengah, dimana capaian nasional sebesar 41.052,20 Juta USD dan capaian Sulawesi Tengah sebesar 11.003,93 Juta USD. Secara nasional proporsi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Ekspor nasional sebesar 7,89%.

SS 3 : Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah

3. IKU 3 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi belum terdapat pembandingan untuk indicator ini.

SS 4 : Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas

4. IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)

Pada tahun 2025, kontribusi PDRB sektor industri pengolahan non migas di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 41,24%. Sementara itu, capaian nasional atau rata-rata daerah lainnya tercatat sebesar 19,07%. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan non migas di Sulawesi Tengah jauh lebih tinggi dibandingkan capaian nasional/daerah lain, dengan selisih sebesar 22,17 poin persentase. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Sulawesi Tengah sangat didominasi oleh sektor industri pengolahan non migas, khususnya industri berbasis sumber daya alam dan pengolahan mineral. Tingginya kontribusi ini mencerminkan peran strategis sektor industri pengolahan non migas sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menunjukkan keberhasilan pengembangan kawasan industri dan hilirisasi. Namun demikian, kondisi ini juga perlu diimbangi dengan penguatan sektor ekonomi lainnya serta peningkatan nilai tambah, efisiensi, dan keberlanjutan industri agar ketergantungan terhadap satu sektor tidak menimbulkan risiko struktural bagi perekonomian daerah.

➤ RENSTRA 2025-2029

Tabel 3.19
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Terhadap Capaian Nasional / Daerah Lainnya (RENSTRA 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Nasional/Daerah Lain	Lebih Tinggi/ Lebih Rendah
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,24	19,07	22,17

2	Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	5,90	na	na
3	Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	11.003,93	41.052,20	(30.048,27)
		Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)	132,25	24,48	107,76
4	Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas	Nilai ekspor produksi industri non-migas (Juta USD)	19.325,87	209.087,80	(189.761,93)
5	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industry	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Orang)	137.860	1.386.000.000	(1.385.862.140)
6	Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)	2,32		

Tujuan : Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)

1. IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Pada tahun 2025, rasio PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 41,24%. Sementara itu, capaian nasional atau rata-rata daerah lainnya tercatat sebesar 19,07%. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa rasio PDRB industri pengolahan di Sulawesi Tengah jauh lebih tinggi dibandingkan capaian nasional/daerah lain, dengan selisih sebesar 22,17 poin persentase. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian daerah Sulawesi Tengah sangat bertumpu pada sektor industri pengolahan, khususnya industri non migas berbasis sumber daya alam dan kegiatan hilirisasi. Tingginya rasio ini mencerminkan peran dominan sektor industri pengolahan sebagai kontributor utama PDRB daerah, sekaligus menunjukkan keberhasilan pembangunan industri dan pengembangan kawasan industri strategis. Namun demikian, kondisi tersebut juga perlu diimbangi dengan diversifikasi struktur ekonomi, peningkatan keterkaitan industri dengan sektor lain, serta penguatan nilai tambah dan keberlanjutan, agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil dan inklusif.

SS 1 : Meningkatkan Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

2. IKU 2 Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi belum terdapat pembanding untuk indicator ini.

SS 2 : Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa

3. IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Nilai Ekspor Bersih nasional lebih tinggi dari capaian Sulawesi Tengah, dimana capaian nasional sebesar 41.052,20 Juta USD dan capaian Sulawesi Tengah sebesar 11.003,93 Juta USD. Secara nasional proporsi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Ekspor nasional sebesar 7,89%.

4. IKU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) nasional lebih tinggi dari capaian Sulawesi Tengah, dimana capaian nasional sebesar 24,48% dan capaian Sulawesi Tengah sebesar 132,25%. Secara nasional proporsi ekspor barang jasa Provinsi Sulawesi Tengah terhadap capaian nasional hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah sangat bergantung pada pasar global, sensitif terhadap harga komoditas dan permintaan luar negeri, dan fluktuasi ekspor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

SS 3 : Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas

5. IKU 5 Nilai Ekspor Produksi Industri Non Migas (Juta USD)

Nilai ekspor produksi industri non migas Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mencapai 19.325,87 juta USD. Sementara itu, capaian nasional atau akumulasi daerah lain tercatat sebesar 209.087,80 juta USD. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi nilai ekspor industri non migas Sulawesi Tengah masih relatif kecil dibandingkan capaian nasional, yaitu sekitar 9,24% dari total capaian nasional/daerah lain. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kinerja ekspor industri non migas di Sulawesi Tengah tergolong tinggi di tingkat regional, namun kontribusinya terhadap total ekspor nasional masih terbatas. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur ekspor nasional masih didominasi oleh beberapa provinsi dengan basis industri dan jaringan ekspor yang lebih luas. Di sisi lain, capaian Sulawesi Tengah menunjukkan potensi besar untuk terus ditingkatkan, khususnya melalui penguatan hilirisasi industri, diversifikasi produk ekspor, perluasan akses pasar internasional, serta

peningkatan daya saing produk industri non migas. Dengan strategi pengembangan yang tepat dan berkelanjutan, nilai ekspor industri non migas Sulawesi Tengah berpeluang memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kinerja ekspor nasional pada periode mendatang.

SS 4 : Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri

6. IKU 6 Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (Orang)

Realisasi Jumlah tenaga kerja di sektor industri Sulawesi Tengah tahun 2025 tercatat sebesar 137.860 orang. Sementara itu, capaian nasional atau total daerah lain mencapai 1.386.000.000 orang. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja industri di Sulawesi Tengah lebih rendah sebesar 1.385.862.140 orang dibandingkan capaian nasional. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja industri Sulawesi Tengah terhadap total tenaga kerja industri nasional masih sangat kecil, yang wajar mengingat populasi dan skala industri Sulawesi Tengah lebih kecil dibandingkan provinsi-provinsi besar atau total nasional. Meskipun jumlahnya relatif kecil, capaian ini tetap mencerminkan peran penting sektor industri dalam menyerap tenaga kerja di tingkat provinsi, terutama pada industri pengolahan dan sektor hilir berbasis sumber daya lokal. Ke depan, diperlukan strategi peningkatan kapasitas industri, pengembangan IKM, dan penyerapan tenaga kerja terampil, agar pertumbuhan industri dapat terus mendorong penciptaan lapangan kerja secara lebih optimal.

SS 5 : Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi

7. IKU 7 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)

Realisasi proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%) tahun 2025 sebesar 2,32 %.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

➤ RENSTRA 2021-2026

SS 1 : Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah

1. IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)

Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%) menunjukkan pertumbuhan riil ekonomi sektor Perdagangan tanpa pengaruh perubahan harga. Tahun 2025 indikator Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan tidak tercapai. Target yang ditetapkan 7,07% dan terealisasi sebesar 5,12% dengan tingkat capaian sebesar 72,42%. Penurunan laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor perdagangan merupakan salah satu indikasi adanya perlambatan aktivitas ekonomi riil yang berkaitan erat dengan dinamika konsumsi masyarakat, distribusi barang, serta stabilitas perekonomian daerah data yang digunakan merupakan data rilis BPS dalam Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan IV-2025, yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Meskipun mengalami pertumbuhan, sektor perdagangan besar dan eceran di Sulawesi Tengah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- Persaingan yang ketat: Persaingan antar pedagang semakin ketat, baik dari pedagang tradisional maupun modern.
- Infrastruktur yang belum memadai: Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, gudang, pasar dan sarana perdagangan lainnya masih perlu ditingkatkan untuk kelancaran distribusi barang.
- Akses permodalan yang terbatas: Masih banyak pedagang kecil yang kesulitan mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran di Sulawesi Tengah. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- Pemerintah terus berupaya membangun dan peningkatan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, gudang dan pasar untuk kelancaran distribusi barang.
- Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pedagang untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.
- Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mempermudah akses permodalan bagi para pedagang.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan sektor perdagangan besar dan eceran di Sulawesi Tengah dapat terus tumbuh dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah.

SS 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih

2. IKU 2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah atau negara yang dinyatakan dalam juta dolar Amerika Serikat (USD). Tahun 2025 indikator Nilai Ekspor Bersih tidak tercapai memiliki target yang ditetapkan 11.949,06 Juta USD dan terealisasi sebesar 11.003,93 Juta USD dengan tingkat capaian sebesar 92,09%. Secara umum capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Tingginya ekspor bersih di Sulawesi Tengah terutama disebabkan oleh besarnya nilai ekspor komoditas tambang dan industri pengolahan, khususnya nikel, yang jauh melampaui nilai impor.

Hal yang mendukung capaian ekspor bersih perdagangan di Sulawesi Tengah dikarenakan adanya ekspor dari sector besi dan baja. Peningkatan hasil tambang / smelter mempengaruhi jumlah realisasi ekspor bersih yang significant selain adanya upaya untuk melahirkan eksportir baru di Sulawesi Tengah melalui klinik ekspor dengan fasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi coaching terkait ekspor dan pasar ekspor. Saat ini, beberapa hal yang menghambat kinerja ekspor adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung ekspor seperti kontainer ekspor, kapal ekspor dan fasilitasi bongkar muat (transportasi) serta permintaan ekspor dari Sulawesi Tengah yang menurun dari negara tujuan diakibatkan kondisi ekonomi global yang melambat.

SS 3 : Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

3. IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) menunjukkan tingkat perbedaan (disparitas) harga barang dan/atau jasa antar kabupaten/kota

dalam satu provinsi. Koefisien variasi (KV) dihitung dari perbandingan simpangan baku harga terhadap rata-rata harga, lalu dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa merata harga antarwilayah. Tahun 2025, target yang ditetapkan 7,2 % dan terealisasi sebesar 5,9% dengan tingkat capaian sebesar 81,94%. Koefisien variasi harga antarwilayah sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan pemerataan harga antar daerah di tingkat provinsi masih tergolong baik, meskipun masih terdapat perbedaan harga kecil yang bersifat normal akibat faktor geografis dan biaya distribusi. Beberapa hal yang berperan penting dalam menjaga stabilisasi harga antara lain pemantauan harga dan ketersediaan BAPOK serta pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah.

Selama tahun 2025, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Dinas Perindag Prov Sulteng telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, seperti:

- Memastikan Ketersediaan Stok Barang Pokok Melalui Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD Teknis, BUMN, Distributor dan Ritel Modern
- Melaksanakan pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok harian di pasar rakyat/pedagang eceran di wilayah masing-masing
- Melaksanakan Operasi Pasar/Pasar Murah untuk menstabilkan harga pangan dan memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder
- Memberikan subsidi ongkos angkut/ harga komoditi dengan bersumber dari APBD sebagai dukungan memperlancar distribusi dan meningkatkan daya beli masyarakat
- Menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan beras medium di pasar dengan memanfaatkan SPHP Beras Medium Perum BULOG secara optimal di wilayah masing-masing
- Mendorong Kerjasama Antar Daerah untuk menjamin kemandirian pangan, khususnya antar daerah dalam Provinsi

- Melakukan pengawasan pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani
- Pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha untuk memperbaiki rantai pasokan pangan, seperti dengan mengurangi perantara.

SS 4 : Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas

4. IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pada indikator ini antara lain : Dominasi Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam, Pengembangan Industri Hilir dan Nilai Tambah, Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Daerah, Investasi dan Aktivitas Industri yang Stabil. Sulawesi Tengah memiliki sektor industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, dan sumber daya mineral yang kuat, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB industri. Meskipun kinerjanya tinggi, beberapa faktor yang dapat menjadi tantangan dan berpotensi membatasi pencapaian lebih optimal adalah : Ketergantungan pada Beberapa Industri Dominan, Keterbatasan Diversifikasi Industri, Keterbatasan SDM dan Teknologi, Akses Pasar dan Infrastruktur, Kendala logistik dan akses pasar, baik domestik maupun internasional, dapat membatasi ekspansi industri pengolahan lebih lanjut. Selain itu adapun masalah-masalah yang sering dihadapi di daerah adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kompetensi SDM industri di Sulawesi Tengah (Aparat dan pelaku industri). Tenaga fungsional industri sebagian besar belum dibekali dengan pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparat dalam melaksanakan pembinaan terhadap pelaku industri
2. Sentra-sentra IKM yang terbentuk di Sulawesi Tengah belum memiliki kelembagaan sehingga belum bisa berfungsi sesuai peruntukannya
3. Belum adanya kemitraan antara industri kecil menengah dengan industri besar dan kawasan yang ada di Sulawesi Tengah
4. Sebagian besar pelaku industri kecil menengah di Sulawesi Tengah belum memahami pentingnya standarisasi dan sertifikasi produk
5. Ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku dalam negeri belum stabil sehingga menjadi kendala untuk mendorong hilirisasi industri

6. Pelaku industri kecil belum bisa memenuhi tingginya permintaan pasar dan perproduksi secara continue dengan kualitas produk yang memenuhi standar
7. Rendahnya pelaku industri kecil, menengah, besar dan kawasan industri yang ada di Sulawesi Tengah dalam melakukan pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
8. Rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku industri dalam penerapan industri hijau
9. Kurang koordinasi lintas sektor/OPD terkait
10. Kurangnya ketersediaan anggaran untuk mendukung program kegiatan yang bisa mendorong pertumbuhan sektor industri

Adapun Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan terkait permasalahan yang dihadapi di daerah adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pelatihan bagi peningkatan kualitas SDM untuk aparat dan pelaku industri kecil menengah (IKM)
2. Mendorong daya saing sentra IKM melalui penguatan kelembagaan
3. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil menengah dengan industri besar dan kawasan yang ada di Sulawesi Tengah
4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis/workshop tentang pentingnya standarisasi dan sertifikasi produk dalam meningkatkan daya saing produk
5. Penguatan sumber bahan baku lokal dan koordinasi lintas sektor hulu ke hilir
6. Perluasan akses pasar bagi pelaku industri kecil dan menengah
7. Mendorong pelaku industri kecil, menengah, besar dan kawasan industri untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan melalui SIINas
8. Perlu dilaksanakan sosialisasi tentang penerapan industri hijau bagi industri
9. Perlu dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektor/OPD terkait Perlunya anggaran dalam mendukung program kegiatan dalam mendorong pertumbuhan sektor industri.

➤ **RENSTRA 2025-2029**

Tujuan : Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)

1. IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pada indikator ini antara lain : Dominasi Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam, Pengembangan Industri Hilir dan Nilai Tambah, Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Daerah, Investasi dan Aktivitas Industri yang Stabil. Sulawesi Tengah memiliki sektor industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, dan sumber daya mineral yang kuat, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB industri. Meskipun kinerjanya tinggi, beberapa faktor yang dapat menjadi tantangan dan berpotensi membatasi pencapaian lebih optimal adalah : Ketergantungan pada Beberapa Industri Dominan, Keterbatasan Diversifikasi Industri, Keterbatasan SDM dan Teknologi, Akses Pasar dan Infrastruktur, Kendala logistik dan akses pasar, baik domestik maupun internasional, dapat membatasi ekspansi industri pengolahan lebih lanjut. Untuk memperkuat capaian indikator di masa mendatang, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah :

1. Diversifikasi Produk Industri — dorong produksi berorientasi ekspor dengan nilai tambah lebih tinggi.
2. Penguatan Keterampilan SDM — program pelatihan vokasi dan teknologi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
3. Pengembangan Klaster Industri — promosi integrasi antar subsektor agar memperluas basis struktural ekonomi.
4. Peningkatan Akses Pasar dan Logistik — dukung konektivitas dan kemudahan distribusi barang industri.

SS 1 : Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

2. IKU 2 Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)

Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) menunjukkan tingkat perbedaan (disparitas) harga barang dan/atau jasa antar

kabupaten/kota dalam satu provinsi. Koefisien variasi (KV) dihitung dari perbandingan simpangan baku harga terhadap rata-rata harga, lalu dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa merata harga antarwilayah. Tahun 2025, target yang ditetapkan 11,1 % dan terealisasi sebesar 5,9% dengan tingkat capaian sebesar 146,85%. Koefisien variasi harga antarwilayah sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan pemerataan harga antar daerah di tingkat provinsi masih tergolong baik, meskipun masih terdapat perbedaan harga kecil yang bersifat normal akibat faktor geografis dan biaya distribusi.

Beberapa hal yang berperan penting dalam menjaga stabilisasi harga antara lain pemantauan harga dan ketersediaan BAPOK serta pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah. Selama tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan pasar murah / operasi pasar sebanyak 20 kali dalam rangka stabilitas harga dan ketersediaan stok BAPOKTING di Provinsi, Kabupaten/Kota, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada saat terjadinya kelangkaan.



Gambar 3. Pelaksanaan Pasar Murah

Sesuai Regulasi Permendag 21/2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, untuk Pemerintah Provinsi sudah tidak memberikan rekomendasi lagi terhadap kabupaten/kota yang akan menerima dana DAK atau TP untuk pembangunan maupun revitalisasi pasar rakyat. Hal tersebut menjadi kendala karena Perintah Provinsi tidak mengetahui jika ada Penerimaan Pembangunan atau Revitalisasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, namun jika terjadi permasalahan Pemerintah Provinsi yang akan dihubungi

terlebih dahulu. Hal ini juga menyebabkan sarana perdagangan utamanya Pasar Rakyat yang dibangun kadang tidak sesuai dengan standar SNI. Sarana Pasaar ber-SNI diharapkan akan menunjang dan mendukung program 9 Berani Gubernur menuju Masyarakat yang makmur dimulai dari Pengelolaan Pasar Rakyat sebagai salah satu tempat fasilitas umum masyarakat melakukan usaha perekonomian.

Selain pelaksanaan Pemantauan harga dan kegiatan operasi pasar / pasar murah terkait Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada tahun 2025 juga melaksanakan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh 2 Unit Pelaksana Teknis yaitu UPT PSMB dan UPT P2K. Pengawasan barang / jasa serta perlindungan konsumen dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi merata, sedangkan pengujian mutu memastikan keamanan dan kualitas tetap terjaga. Keduanya saling melengkapi dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.20 Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2021-2025

Uraian		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Jumlah Komoditi yang di Uji	77	148	384	478	218
2	Jumlah Alat yang di Kalibrasi	207	158	305	366	333

Tabel 3.21 Rekap Pengaduan Konsumen oleh BPSK Tahun 2025

No	BPSK Kab/Kota	Alamat Bpsk	Jumlah Pengaduan	Jumlah Penyelesaian
1	Bpsk Kota Palu	Jalan Kartini No. 412 Palu	17	17
2	Bpsk Kabupaten Donggala	Jalan Pue Mami No. 5	14	14
3	Bpsk Kabupaten Toli-Toli	Jalan Magamu No. 86	12	12
4	Bpsk Kabupaten Morowali	Jalan Sist. Al Jufri Lorong Camar No. 05 Kel. Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah	15	15
Total Keseluruhan			58	58

SS 2 : Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa

3. IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah atau negara yang dinyatakan dalam juta dolar Amerika Serikat (USD). Tahun 2025 indikator Nilai Ekspor Bersih tidak tercapai memiliki target yang ditetapkan 11.041,52 Juta USD dan terealisasi sebesar 11.003,93 Juta USD dengan tingkat capaian sebesar 99,66%. Secara umum capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Tingginya ekspor bersih di Sulawesi Tengah terutama disebabkan oleh besarnya nilai ekspor komoditas tambang dan industri pengolahan, khususnya nikel, yang jauh melampaui nilai impor.

Hal yang mendukung capaian ekspor bersih perdagangan disebabkan adanya ekspor dari sector besi dan baja. Peningkatan hasil tambang / smelter mempengaruhi jumlah realisasi ekspor bersih yang significant selain adanya upaya untuk melahirkan eksportir baru di Sulawesi Tengah melalui klinik ekspor dengan fasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi coaching terkait ekspor dan pasar ekspor. Saat ini, beberapa hal yang menghambat kinerja ekspor adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung ekspor seperti kontainer ekspor, kapal ekspor dan fasilitasi bongkar muat (transportasi) serta permintaan ekspor dari Sulawesi Tengah yang menurun dari negara tujuan diakibatkan kondisi ekonomi global yang melambat.

Selama Tahun 2025, guna mendukung kinerja ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah aktif mengikuti event-event seperti Pameran Trade Expo Indonesia, Pameran Semarak Sulteng Nambaso, Pameran Sulteng Coffee Festival, dan Festival Teluk Tomini.

Selain berpartisipasi dalam event-event tersebut dinas juga aktif melaksanakan FGD Akselerasi Ekspor dan menggiatkan KLINIK EKSPOR yang merupakan salah satu inovasi yang dibentuk oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk memperkenalkan KLINIK EKSPOR kepada Masyarakat salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu KLINIK EKSPOR Goes to Campus yang sasarannya adalah para mahasiswa. Pemilihan lokasi serta sasaran ini adalah salah satu upaya dari Pemerintah Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa tentang ekspor dan pasar internasional dan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wirausahawan muda yang siap bersaing di pasar global.



Gambar 4. Pelaksanaan TEI

4. IKU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)

Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) menunjukkan seberapa besar kontribusi ekspor barang dan jasa dalam membentuk PDRB daerah, yang mencerminkan orientasi ekspor dan keterkaitan ekonomi daerah dengan pasar luar. Tahun 2025 indikator Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) tercapai. Target yang ditetapkan 90,74 - 92,16 % dan terealisasi sebesar 128,48% dengan tingkat capaian sebesar 143,50%. Capaian yang tinggi ini

menggambarkan tingkat keterbukaan ekonomi daerah terhadap pasar luar (luar provinsi maupun luar negeri), yang mana semakin tinggi persentasenya, semakin besar ketergantungan dan kontribusi kegiatan ekspor dalam mendorong perekonomian daerah.

Keberhasilan Ekspor Barang dan Jasa (% tPDRB) di Provinsi Sulawesi Tengah terutama dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang sangat berorientasi ekspor dan dukungan investasi industri pengolahan. Berikut faktor-faktor utamanya:

- Dominasi Industri Pengolahan Berbasis Nikel
- Masuknya Investasi Besar (PMDN & PMA) di Kawasan industri.
- Adanya Kebijakan Hilirisasi Nasional
- Tersedianya Infrastruktur dan Akses Pelabuhan Industri mempermudah ekspor langsung.

Selama Tahun 2025, guna mendukung kinerja ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah aktif mengikuti event-event seperti Pameran Trade Expo Indonesia, Pameran Semarak Sulteng Nambaso, Pameran Sulteng Coffee Festival, Festival Teluk Tomini, FGD Akselerasi Ekspor, KLINIK EKSPOR Goes to Campus.

SS 3 : Meningkatkan Nilai ekspor produk industri non migas

5. IKU 5 Nilai Ekspor Produksi Industri Non Migas (Juta USD)

Pada tahun 2025, nilai ekspor produksi industri non migas Sulawesi Tengah mencapai 19.325,87 juta USD, dengan tingkat kemajuan yang sangat tinggi terhadap target Renstra. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain :

- a. Ekspor didominasi oleh produk industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, seperti hasil pertambangan dan pengolahan komoditas unggulan, yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional.
- b. Pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi meningkatkan nilai tambah dan nilai ekspor industri non migas.

- c. Fasilitasi perizinan, pengembangan kawasan industri, serta dukungan terhadap kegiatan ekspor mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja ekspor industri.
- d. Investasi yang relatif stabil pada industri pengolahan menjaga keberlanjutan produksi dan kemampuan ekspor sepanjang tahun.

Meskipun capaian ekspor tergolong tinggi, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala atau berpotensi menghambat pencapaian yang lebih optimal, antara lain :

- a. Struktur ekspor yang masih terkonsentrasi pada beberapa jenis komoditas membuat kinerja ekspor rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan global.
- b. Produk ekspor industri non migas belum sepenuhnya beragam, serta pasar ekspor masih terbatas pada negara tertentu.
- c. Kendala pada sarana transportasi dan efisiensi logistik dapat meningkatkan biaya dan menurunkan daya saing produk ekspor.
- d. Penguasaan teknologi industri dan kualitas SDM yang belum merata membatasi peningkatan produktivitas dan kualitas produk ekspor.

Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 mengindikasikan bahwa strategi pengembangan industri dan peningkatan ekspor telah berjalan efektif. Ke depan, diperlukan upaya diversifikasi produk industri pengolahan non-migas, peningkatan nilai tambah, serta perluasan pasar ekspor guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan kinerja sektor industri daerah.

Guna mendukung indikator Nilai Ekspor Produksi Industri Non Migas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri telah melakukan Sosialisasi Peta Perwilayahan Industri Sulawesi Tengah Tahun 2025.



Gambar5. Pelaksanaan Sosialisasi Peta Perwilayahan Industri

Pelaksanaan Sosialisasi Peta Perwilayahan Industri pada umumnya berjalan dengan baik, didukung oleh adanya keselarasan kebijakan pusat dan daerah, potensi sumber daya industri di wilayah Sulawesi Tengah, serta meningkatnya koordinasi lintas OPD. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum optimalnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor, keterbatasan infrastruktur pendukung di sebagian wilayah, perbedaan tingkat kesiapan daerah dan pelaku industri serta keterbatasan anggaran yang ada. Sebagai upaya perbaikan, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penerapan pendekatan pengembangan industri berbasis wilayah, fasilitasi perizinan dan investasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan perwilayahan industri.

Pada tahun berikutnya, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah guna memastikan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan, penyebaran, dan perwilayahan industri. Selain itu juga perlu dilaksanakan pemutakhiran peta potensi dan prioritas wilayah industri sebagai dasar penetapan lokasi dan jenis industri unggulan sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan

industri daerah, yang pelaksanaannya memerlukan dukungan anggaran yang memadai.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan, diperlukan ketersediaan anggaran yang berkelanjutan guna mendukung kegiatan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku industri agar kebijakan perwilayahan industri dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi industri di Sulawesi Tengah berkontribusi terhadap pertumbuhan nilai ekspor non-migas, terutama dari komoditas logam dasar dan produk turunannya. Dengan demikian, semakin optimal pelaksanaan sosialisasi Peta Perwilayahan Industri, semakin besar peluang peningkatan kinerja indikator Nilai Ekspor Produksi Industri Non-Migas melalui peningkatan volume ekspor dan nilai tambah produk industri daerah.

SS 4 : Meningkatkan tenaga kerja di sektor industri

6. IKU 6 Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (Orang)

Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja di sektor industri Sulawesi Tengah mencapai 137.860 orang, bahkan melampaui target akhir Renstra, sehingga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Keberhasilan tersebut didorong oleh beberapa faktor berikut :

- a. Meningkatnya aktivitas industri pengolahan, baik skala menengah maupun besar, mendorong penyerapan tenaga kerja baru.
- b. Beroperasinya kawasan industri dan sentra industri di Sulawesi Tengah membuka peluang kerja yang cukup besar, terutama di sektor industri pengolahan non migas.
- c. Kemudahan perizinan, insentif investasi, serta dukungan pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja industri.

d. Pertumbuhan jumlah IKM turut berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja lokal, terutama tenaga kerja semi-terampil.

Sedangkan beberapa tantangan yang dihadapi adalah Penyerapan tenaga kerja masih terkonsentrasi pada beberapa subsektor industri, sehingga rentan terhadap perlambatan sektor tertentu, Penerapan teknologi dan otomatisasi pada sebagian industri berpotensi membatasi penyerapan tenaga kerja baru dalam jangka panjang. Infrastruktur transportasi dan logistik yang belum optimal dapat membatasi ekspansi industri dan peluang kerja baru.

Selama tahun 2025, guna mendukung meningkatnya tenaga kerja di sektor industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri telah melakukan pendampingan/pelatihan vokasi pengelasan di Kota Palu .



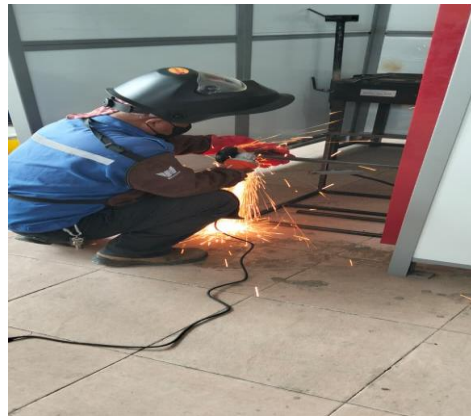
Pelatihan vokasi pengelasan merupakan salah satu program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan sektor industri. Program ini dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi tingkat pengangguran, khususnya pada usia produktif.

Gambar 6 Pelatihan vokasi pengelasan

Pelatihan vokasi pengelasan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan indikator tenaga kerja sektor industri, khususnya dalam aspek kompetensi, penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan peningkatan

pendapatan. Program ini efektif sebagai salah satu strategi penguatan SDM industri dan pengurangan pengangguran.

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yang ditemui, antara lain:



Gambar 7. Pelatihan vokasi pengelasan

a. Keterbatasan Waktu Pelatihan

Durasi pelatihan relatif terbatas sehingga belum seluruh peserta dapat menguasai teknik pengelasan secara maksimal.

b. Perbedaan Latar Belakang Peserta

Peserta memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih variatif.

c. Jumlah Peralatan Praktik yang Terbatas

Pada saat praktik, jumlah peralatan las belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah peserta, sehingga pelaksanaan praktik harus dilakukan secara bergantian.

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, beberapa langkah dan solusi telah dilakukan, antara lain:

a. Pengaturan Jadwal Praktik Secara Bergiliran

Untuk mengatasi keterbatasan peralatan, peserta dibagi dalam beberapa kelompok kecil agar setiap peserta tetap mendapatkan kesempatan praktik yang memadai.

b. Pendampingan Intensif oleh Instruktur

Instruktur memberikan bimbingan lebih intensif kepada peserta yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi atau praktik pengelasan.

- c. Penyesuaian Metode Pembelajaran
Metode pelatihan disesuaikan dengan kondisi peserta, dengan menyeimbangkan antara penyampaian teori dan praktik langsung.
- d. Evaluasi dan Umpan Balik
Dilakukan evaluasi di akhir kegiatan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta dan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan pelatihan selanjutnya.

SS 5 : Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi

7. IKU 7 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)

Pada tahun 2025, proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Sulawesi Tengah mencapai 2,32%, melampaui target akhir Renstra sebesar 2,12%. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

- a. Bertambahnya jumlah IKM yang terdata dan memiliki legalitas usaha meningkatkan proporsi IKM di tingkat provinsi.
- b. Program fasilitasi perizinan, pelatihan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan dan teknologi mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan IKM.
- c. Meningkatnya akses IKM terhadap pembiayaan serta kemitraan dengan industri yang lebih besar memperkuat peran IKM dalam struktur industri daerah.
- d. IKM berbasis potensi dan kearifan lokal berkembang, terutama pada sektor pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan.

Namun masih dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan skala usaha, kualitas SDM, akses pasar, dan ketahanan usaha. Penguatan kapasitas dan daya saing IKM menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan capaian di tahun-tahun berikutnya.

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

➤ RENSTRA 2021-2026

Tabel 3.22

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (RENSTRA 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi**	Capaian %	Target	Realisasi**	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-9
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah	Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)	7,07	5,12	72,42	1.779.782.181	1.616.892.195	90,85	(18,43)
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)	11.949,06	11.003,93	92,09	727.797.750	709.305.380	97,46	(5,37)
3	Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	7,2	5,9	81,94	1.550.525.250	1.456.094.265	93,91	(11,97)
4	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	41,45	41,24	99,49	6.928.104.151	5.985.694.329	86,40	13,10

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa 3 IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merujuk pada RENSTRA 2021-2026 memiliki efisiensi yang cukup rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya factor-faktor yang mempengaruhi PDRB sektor perdagangan dan sektor industry pengolahan non migas. Adapun efisiensi sasaran strategis ini dijabarkan sebagai berikut:

- Sasaran strategis 1 didukung oleh 4 (empat) program, yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, serta Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. SS 1 didukung anggaran sebesar Rp 1.779.782.181,-. Efisiensi sasaran strategis ini (-18,43) poin.

- Sasaran strategis 2 didukung oleh 2 (dua) program, yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, serta Program Pengembangan Ekspor. SS 2 didukung anggaran sebesar Rp 709.305.380,-. Efisiensi sasaran strategis ini (-5,37) poin.
- Sasaran strategis 3 didukung oleh 1 (satu) program, yakni Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. SS 3 didukung anggaran sebesar Rp 1.550.525.250,-. Efisiensi sasaran strategis ini (-11,97) poin.
- Sasaran strategis 4 didukung oleh 3 (tiga) program, yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, serta Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. SS 4 didukung anggaran sebesar Rp 6.928.104.151,-. Efisiensi sasaran strategis ini 13,10 poin.

➤ **RENSTRA 2025-2029**

Tabel 3.23
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (RENSTRA 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi**	Capaian %	Target	Realisasi**	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-9
1	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	40,97-41,45	41,24	99,49	10.986.209.332	9.767.986.169	88,91	10,58
2	Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	11,10	5,90	146,85	3.330.307.431	3.072.986.460	92,27	54,57
3	Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	11.041,52	11.003,93	99,66	614.146.350	603.967.966	98,34	1,32
		Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)	90,74 - 92,16	132,25	143,50	113.651.400	105.337.414	92,68	50,81
4	Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas	Nilai ekspor produksi industri non-migas (Juta USD)	18.398,59	19.325,87	105,04	4.965.802.985	4.357.860.369	87,76	17,28
5	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industry	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Orang)	135.417,00	137.860	101,80	806.844.850	523.209.017	64,85	36,96
6	Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)	1,31	2,32	177,10	1.155.456.316	1.104.624.943	95,60	81,50

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 7 IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merujuk pada RENSTRA 2025-2029 memiliki efisiensi yang cukup tinggi. Adapun efisiensi sasaran strategis ini dijabarkan sebagai berikut:

- Sasaran strategis 1 didukung oleh 5 (lima) program, yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, serta Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. SS 1 didukung anggaran sebesar Rp 3.330.307.431,-. Efisiensi sasaran strategis ini 54,57 poin.
- Sasaran strategis 2 memiliki 2 indikator yang didukung oleh 2 (dua) program, yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, serta Program Pengembangan Ekspor. Indikator SS 2 didukung anggaran masing-masing sebesar Rp 614.146.350,- dan Rp 113.651.400,-. Efisiensi sasaran strategis ini masing-masing sebesar 1,32 poin dan 50,81 poin.
- Sasaran strategis 3 didukung oleh 2 (dua) program, yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, serta Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. SS 3 didukung anggaran sebesar Rp 4.965.802.985,-. Efisiensi sasaran strategis ini (-11,97) poin.
- Sasaran strategis 4 didukung oleh 2 (dua) program, yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, serta Program Pengendalian Izin Usaha Industri, . SS 4 didukung anggaran sebesar Rp 806.844.850,-. Efisiensi sasaran strategis ini 36,96 poin.
- Sasaran strategis 5 didukung oleh 1 (satu) program, yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. SS 5 didukung anggaran sebesar Rp 1.155.456.316,- . Efisiensi sasaran strategis ini 81,50 poin.

G. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.24

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Program dan Kegiatan		Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang DAGRI									
	Prog.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100,00	37.397.250	100,00	36.021.220	100,00	96,32
	Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor	Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani	100,00	37.397.250	100,00	36.021.220	100,00	96,32
	Prog.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	10,00	99.354.400	10,00	98.000.564	100,00	98,64
	Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Meningkatnya ketersediaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditas sesuai dengan standar	Persentase sarana prasaran perdagangan sesuai standar	10,00	99.354.400	10,00	98.000.564	100,00	98,64
	Prog.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	5,5	1.550.525.250	5,30	1.456.094.265	103,64	93,91
	Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	100,00	56.075.200	100,00	29.112.132	100,00	51,92
	Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Meningkatnya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota yang ditindak lanjuti	100,00	1.464.417.550	100,00	1.410.822.133	100,00	96,34
	Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	90,00	30.032.500	71,52	16.160.000	79,47	53,81

	Prog.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikuti sertakan pada kegiatan pameran produk dalam negeri	10,00	124.368.300	9,60	82.860.920	96,00	66,63
	Keg.	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Meningkatnya keikutsertaan pelaku usaha pada kegiatan pameran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran produk dalam negeri	10,00	51.457.600	10,00	33.832.800	100,00	65,75
	Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang diikuti sertakan pada bimtek produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	10,00	58.475.900	10,00	49.028.120	100,00	83,84
	Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya penggunaan produk dalam negeri	Persentase masyarakat yang paham pentingnya penggunaan produk dalam negeri	80,00	14.434.800	0,00	0	0,00	0,00
2	Bidang DAGLU									
	Prog.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan luar negeri yang Difasilitasi	100,00	113.651.400	100,00	105.337.414	100,00	92,68
	Keg.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	100,00	113.651.400	100,00	105.337.414	100,00	92,68
	Prog.	Pengembangan Ekspor	Terwujudnya Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	23.470,96	614.146.350	22.316,46	603.967.966	95,08	98,34
	Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Meningkatnya Promosi bagi Produk Ekspor Unggulan Daerah	Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi	100,00	614.146.350	100,00	603.967.966	100,00	98,34
3	Bidang PSDI									
	Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi	100,00	622.934.000	100,00	352.244.237	100,00	56,55
	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terfasilitasinya angkatan kerja melalui kegiatan vokasi	Jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi	20,00	622.934.000	20,00	352.244.237	100,00	56,55
	Prog.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100,00	183.910.850	100,00	170.964.780	100,00	92,96
	Keg.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha Industri yang terawasi dan terkendali (%)	100,00	183.910.850	100,00	170.964.780	100,00	92,96
4	Bidang SP2I									
	Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	93,04	4.927.745.250	86,26	4.324.482.212	92,71	87,76
	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Meningkatnya Persentase pertumbuhan industri	Persentase Pertumbuhan jumlah industri	4,70	4.927.745.250	7,79	4.324.482.212	165,83	87,76

	Prog.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	89,00	38.057.735	75,00	33.378.157	84,27	87,70
	Keg.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terawasinya industri kewenangan provinsi yang melapor pada SIINas	Persentase industri kewenangan provinsi yang melapor pada SIINas	67,02	38.057.735		33.378.157	0,00	87,70
5	UPT PSMB									
	Prog.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk	Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi yang terakreditasi dan Non akreditasi	86,00	440.935.431	68,27	392.024.891	79,38	88,91
	Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kalibrasi alat ukur industri dan usaha berdasarkan standar internasional (SI)	Persentase kalibrasi alat ukur industri dan usaha berdasarkan standar internasional (SI)	100,00	440.935.431	90,98	392.024.891	90,98	88,91
			Terlaksananya Pengujian mutu komoditi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Persentase pengujian komoditi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	100,00		45,61		45,61	
6	UPT P2IPK									
	Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	Cakupan Bina Pelaku IKM	15,00	1.155.456.316	14,18	1.104.624.943	94,55	95,60
	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya fasilitasi layanan IKM	Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	1.069,00	1.155.456.316	979,00	1.104.624.943	91,58	95,60
7	UPT P2K									
	Prog.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100,00	1.077.726.800	100,00	1.007.984.600	100,00	93,53
	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase fasilitasi pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	945.669.400	100,00	916.092.570	100,00	96,87
	Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	80,00	132.057.400	91,81	91.892.030	114,76	69,58
Jumlah						10.986.209.332,00		9.767.986.169,00		88,91

Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ini dijabarkan sebagai berikut:

- Sasaran strategis 1 didukung oleh 5 (lima) program, yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, serta Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. SS 1 didukung anggaran sebesar Rp 3.330.307.431,- dan terealisasi sebesar Rp 3.072.986.460.
- Sasaran strategis 2 memiliki 2 indikator yang didukung oleh 2 (dua) program, yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, serta Program Pengembangan Ekspor. Indikator SS 2 didukung anggaran masing-masing sebesar Rp 614.146.350,- dan Rp 113.651.400,- dengan realisasi masing-masing sebesar Rp 603.967.966,- dan Rp 105.337.414,-.
- Sasaran strategis 3 didukung oleh 2 (dua) program, yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, serta Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. SS 3 didukung anggaran sebesar Rp 4.965.802.985,- dan terealisasi sebesar Rp 4.357.860.369.
- Sasaran strategis 4 didukung oleh 2 (dua) program, yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, serta Program Pengendalian Izin Usaha Industri. SS 4 didukung anggaran sebesar Rp 806.844.850,- dan terealisasi sebesar Rp 523.209.017.
- Sasaran strategis 5 didukung oleh 1 (satu) program, yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. SS 5 didukung anggaran sebesar Rp 1.155.456.316 dan terealisasi sebesar Rp 1.104.624.943.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan APBD tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Desember tahun 2025, pagu Belanja Daerah Rp. 38.657.951.981,30 dengan realisasi Rp. 33.878.850.789,00 (87,64%). Realisasi anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Realisasi APBD TA 2025 berdasarkan Belanja

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
4	PENDAPATAN DAERAH	218.500.000,00	204.239.950,00	93,47
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	218.500.000,00	204.239.950,00	93,47
4.1.02	Retribusi Daerah	173.500.000,00	186.239.950,00	107,34
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.000.000,00	18.000.000,00	40,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.500.000,00	204.239.950,00	93,47
5	BELANJA DAERAH	38.657.951.981,30	33.878.850.789,00	87,64
5.1	BELANJA OPERASI	32.049.110.105,30	27.509.114.342,00	85,83
5.1.01	Belanja Pegawai	15.389.417.000,30	12.238.154.912,00	79,52
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.859.693.105,00	14.470.959.430,00	91,24
5.1.05	Belanja Hibah	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	32.049.110.105,30	27.509.114.342,00	85,83
5.2	BELANJA MODAL	6.608.841.876,00	6.369.736.447,00	96,38
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.608.841.876,00	6.369.736.447,00	96,38
	JUMLAH BELANJA MODAL	6.608.841.876,00	6.369.736.447,00	96,38
	JUMLAH BELANJA	38.657.951.981,30	33.878.850.789,00	87,64
	SURPLUS/DEFISIT	(38.439.451.981,30)	(33.674.610.839,00)	87,60

Tabel 3.26
Realisasi APBD TA 2025 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Teknis

No.	URAIAN ROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)
1	Bidang DAGRI				
	Prog.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	37.397.250	36.021.220	96,32
	Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	37.397.250	36.021.220	96,32
	Prog.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	99.354.400	98.000.564	98,64
	Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	99.354.400	98.000.564	98,64
	Prog.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.550.525.250	1.456.094.265	93,91

	Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	56.075.200	29.112.132	51,92
	Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.464.417.550	1.410.822.133	96,34
	Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	30.032.500	16.160.000	53,81
	Prog.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	124.368.300	82.860.920	66,63
	Keg.	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	51.457.600	33.832.800	65,75
	Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	58.475.900	49.028.120	83,84
	Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	14.434.800	0	0,00
2	Bidang DAGLU				
	Prog.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	113.651.400	105.337.414	92,68
	Keg.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	113.651.400	105.337.414	92,68
	Prog.	Pengembangan Ekspor	614.146.350	603.967.966	98,34
	Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	614.146.350	603.967.966	98,34
3	Bidang PSDI				
	Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	622.934.000	352.244.237	56,55
	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	622.934.000	352.244.237	56,55
	Prog.	Pengendalian Izin Usaha Industri	183.910.850	170.964.780	92,96
	Keg.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	183.910.850	170.964.780	92,96
4	Bidang SP2I				
	Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.927.745.250	4.324.482.212	87,76
	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4.927.745.250	4.324.482.212	87,76
	Prog.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	38.057.735	33.378.157	87,70
	Keg.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	38.057.735	33.378.157	87,70
5	UPT PSMB				
	Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	440.935.431	392.024.891	88,91
	Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	440.935.431	392.024.891	88,91
6	UPT P2IPK				
	Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.155.456.316	1.104.624.943	95,60
	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.155.456.316	1.104.624.943	95,60
7	UPT P2K				
	Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.077.726.800	1.007.984.600	93,53
	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	945.669.400	916.092.570	96,87
	Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	132.057.400	91.892.030	69,58
Jumlah			10.986.209.332	9.767.986.169	88,91

Tabel 3.27

Realisasi APBD TA 2025 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang

NO	URAIAN ROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)
1	SEKRETARIAT				
	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.207.409.045	15.996.428.049	83,28
	Keg.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	376.917.250	365.926.821	97,08
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.810.158.300	13.648.975.022	81,19
	Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	121.135.500	120.079.820	99,13
	Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.145.000	56.825.000	97,73
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.492.675	354.642.411	96,77
	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.882.900	220.628.900	95,56
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.703.620	479.318.952	99,50
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.973.800	750.031.123	98,43
2	UPT. PSMB				
	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.309.956.079	7.007.520.935	95,86
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	284.430.000	239.476.000	84,20
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.813.113	82.631.890	98,59
	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.550.618.826	6.319.582.655	96,47
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.726.848	240.833.050	90,97
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.367.292	124.997.340	98,92
3	UPT. P2IPK				
	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	784.053.125	744.765.220	94,99
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	391.740.000	384.515.000	98,16
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.423.315	43.666.240	96,13
	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0,00
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.436.310	194.518.969	97,53
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.453.500	122.065.011	82,78
4	UPT. P2K				
	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	370.324.400	362.150.416	97,79
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	231.960.000	228.760.000	98,62
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.045.700	27.545.008	98,21
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.606.800	45.030.949	92,64
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.711.900	60.814.459	98,55
Jumlah			27.671.742.649	24.110.864.620	87,13

3.3 Penghargaan

a. Nasional

Indonesian Market Surveillance (INAMS) Award yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, bekerja sama dengan United Kingdom Mission to ASEAN. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah serta petugas pengawas yang telah memanfaatkan Sistem Indonesian Market Surveillance (INAMS) secara optimal dan konsisten dalam pelaporan serta pengawasan barang beredar dan jasa di pasar. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat komitmen penggunaan INAMS sebagai sistem pelaporan nasional hasil pengawasan barang beredar dan jasa.

Sejak disosialisasikan secara menyeluruh pada tahun 2023 hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 2.553 laporan hasil pengawasan telah dilaporkan melalui sistem INAMS. Adapun jumlah provinsi yang telah berpartisipasi mencapai 37 Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia.



Gambar. 8 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Richard Arnaldo, SE., M.SA., menghadiri kegiatan Indonesian Market Surveillance (INAMS) Award

Pada tahun 2026, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah dan petugas pengawas yang menunjukkan kinerja optimal dalam pelaporan pengawasan melalui sistem INAMS.

Penilaian INAMS Award dilakukan berdasarkan pembobotan 60 persen kuantitas dan 40 persen kualitas. Kuantitas dinilai dari jumlah laporan pengawasan yang diinput oleh petugas di masing-masing provinsi, sedangkan kualitas dinilai dari laporan yang dilengkapi dengan pengujian dan pengecekan silang serta minim revisi.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, **Provinsi Sulawesi Tengah berhasil meraih peringkat ke-2 dari 10 besar provinsi terbaik di Indonesia**, dengan peringkat sebagai berikut:

1. Jawa Barat
2. Sulawesi Tengah
3. Jawa Tengah
4. Bangka Belitung
5. DKI Jakarta
6. Kalimantan Utara
7. Kepulauan Riau
8. D.I. Yogyakarta
9. D.I. Aceh
10. Papua Barat

Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memperkuat pengawasan barang beredar dan meningkatkan perlindungan konsumen secara berkelanjutan.

b. Antar OPD

- Berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah berhasil meraih Peringkat 4 dengan Predikat “B” (Baik) dan nilai 61,38. Penilaian ini tertuang dalam Berita Acara Nomor 000.5.15/1794/Bid.BINWAS tanggal 3 Desember 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tengah meraih peringkat ke-2 dengan predikat “Informatif” pada Penganugerahan

Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2025.

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah berhasil meraih predikat “A” dengan nilai 85,55 pada SAKIP Award Tahun 2025 atas hasil evaluasi Tahun 2024, yang menunjukkan implementasi akuntabilitas kinerja dengan kategori “Memuaskan.”



Gambar. 9 Penghargaan Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pencapaian yang telah disajikan sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi telah berupaya secara maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berorientasi pada Akuntabilitas Kinerja mengacu kepada Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang berpedoman pada RENSTRA Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Tahun 2025-2029.

Pencapaian tersebut adalah :

➤ **RENSTRA Tahun 2021-2026**

1. IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%) dengan realisasi sebesar 5,12% dan tingkat capaian sebesar 72,42%.
2. IKU 2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) dengan realisasi sebesar 11.003,93 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 92,09%.
3. IKU 3 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) dengan realisasi sebesar 5,9% dan tingkat capaian sebesar 81,94%.
4. IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) dengan realisasi sebesar 41,24% dan tingkat capaian sebesar 94,99%.

➤ **RENSTRA Tahun 2021-2026**

1. IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) dengan realisasi sebesar 41,24% dan tingkat capaian sebesar 94,99%.
2. IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) dengan realisasi sebesar 5,9 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 146,85%.
3. IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) dengan realisasi sebesar 11.003,93 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 99,66%.
4. IKU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) dengan realisasi sebesar 132,25% dan tingkat capaian sebesar 143,50%.

5. IKU 5 Nilai ekspor produksi industri non-migas (Juta USD) dengan realisasi sebesar 19.325,87 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 105,04%.
6. IKU 6 Jumlah tenaga kerja di sektor industri (Orang) dengan realisasi sebesar 137.860 orang dan tingkat capaian sebesar 101,80%.
7. IKU 7 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%) dengan realisasi sebesar 2,32% dan tingkat capaian sebesar 177,10%.

Pencapaian tersebut didukung dengan kerangka pendanaan APBD sebesar Rp. 38.657.951.981,30 dengan realisasi Rp. 33.878.850.789,00 atau sebesar 87,64% untuk realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 95%.

4.2 Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target antara lain :

- ✓ Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal.
- ✓ Masih rendahnya kualitas SDM dalam hal pemahaman akan pentingnya penerapan standar industri bagi produk industri dalam rangka peningkatan daya Saing.
- ✓ Pemasaran hasil produk industri masih bersifat lokal.
- ✓ Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha tentang SNI dan spesifikasi teknisnya.
- ✓ Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap keuntungan dan dampak ekonomi penerapan SNI.
- ✓ Terbatasnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) baik dari sisi jumlah, cakupan pengujian dan penyebarannya.
- ✓ Masih kurangnya sosialisasi penerapan SNI kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- ✓ Kurangnya komitmen penerapan SNI dan lemahnya koordinasi pengawasan penerapan SNI.
- ✓ Masih rendahnya daya saing komoditi ekspor daerah.

- ✓ Masih kurangnya investasi komoditi untuk mengelola bahan baku menjadi produk yang siap ekspor.
- ✓ Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha industri pengolahan terhadap pentingnya penerapan standar industri terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri.
- ✓ Terbatasnya kesadaran terhadap pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor industri dalam rangka pencapaian peningkatan produktivitas sektor industri.
- ✓ Belum tersedianya database terkait ketersediaan dan keberlanjutan Sumber Daya Alam sebagai bahan baku industri dari instansi teknis terkait dalam rangka pembangunan industri unggulan daerah.
- ✓ Terbatasnya kemampuan kompetensi teknis aparatur terkait standardisasi, produksi, dan manajerial di sektor industri.

4.3 Rekomendasi

Rekomendasi upaya pemecahan masalah di sektor perdagangan adalah :

- ✓ Meningkatkan pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya agar tidak terjadi fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan memperlancar suplai barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya..
- ✓ Meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan terkait informasi ekspor dan pendampingan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang berpotensi ekspor.

Rekomendasi di sektor industri, penerapan standar telah membuka dimensi dan tantangan-tantangan baru yang berimplikasi positif bagi pelaku industri dalam hal proses inovasi, pengurangan ongkos produksi, keamanan produk, akses pasar global, manajemen risiko, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, hubungan pelanggan, efisiensi energi dan tanggung jawab sosial. Sehingga upaya pemecahan masalah adalah sebagai berikut

- ✓ Diperlukan peran pembinaan dari aparat pembina untuk dapat mensosialisasikan terkait penerapan standard industri yaitu SNI bagi produk yang telah terbit SNInya.
- ✓ Diperlukan adanya upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi sektor industri
- ✓ Memberikan dukungan dalam bentuk promosi dalam bentuk akses pasar yang lebih luas skala nasional dan skala internasional bagi produk unggulan daerah.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RICHARD ARNALDO, SE.,MSA
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RICHARD ARNALDO, SE.,MSA
Pembina Utama Madya
NIP. 19821123 200604 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Unggulan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	40,97 - 41,45
2.	Meningkatnya Pemerataan Distribusi Dan Harga kebutuhan Barang Pokok Antarwilayah Di Provinsi Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi (%)	11,1
3.	Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	11.041,52
		Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)	90,74 - 92,16
4.	Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas	Nilai Ekspor Produksi Industri Non Migas (Juta USD)	18.398,59
5.	Meningkatnya Tenaga Kerja Di Sektor Industri	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (Orang)	135.417
6.	Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	1.31

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Penunjang Urusan Permerintahan Daerah Provinsi	Rp. 26.971.309.898,	APBD
2 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 156.519.250	APBD
3 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 96.664.400	APBD
4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.350.978.700	APBD
5 Program Pengembangan Ekspor	Rp. 530.024.550	APBD
6 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 1.436.665.171	APBD
7 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 124.833.300	APBD
8 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 6.124.837.446	APBD
9 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 133.911.250	APBD

10 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	44.257.735	APBD
11 Program Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	158.955.000	APBN
12 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	326.959.000	APBN

Palu, 16 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.,MSA
Pembina Utama Madya
NIP. 19821123 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM**
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
Plt. SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perindustrian dan Perdagangan	- INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	- 66
Keg	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	- 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- 81
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- 1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan - 2. Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	- 100 - 90
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	- Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	- 100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	- 100
	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	- 1. Nilai Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah - 2. Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	- 80 - 80
	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	- 1. Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	- 4
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	- 2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	- 91
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	- 3. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	- 100
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	- 4. Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah - 5. Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	- 80 - 80
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- 1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah - 2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	- 90 - 88.31
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	- Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	- 80

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= Rp. 19,207,409,045	APBD
Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	= Rp. 376,917,250	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	= Rp. 16,810,158,300	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp. 121,135,500	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	= Rp. 761,973,800	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	= Rp. 58,145,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp. 366,492,675	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	= Rp. 481,703,620	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	= Rp. 230,882,900	

Palu, 6 NOVEMBER 2025


PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RICHARD ARNALDO, SE.MSA
 NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
Pt. SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
 NIP. 19821123 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha	- Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	- 100%
	Keg. Meningkatnya penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor	- Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani	- 100%
	Sub.keg Terlayannya permohonan Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP MB dan Bahan Berbahaya bagi Distributor melalui layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Persentase Permohonan Rekomendasi SIUP-MB dan B2 yang terlayani	- 100%
	Tersosialisasinya Peraturan perizinan Perdagangan bagi pelaku usaha	- Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perizinan Perdagangan	- 30 orang
	Terawasinya Pelaku Usaha B2 dan MB di Kabupaten/Kota	- Jumlah Pelaku Usaha B2 dan MB di Kabupaten/Kota (Kab. Banggai)	- 3 Pelaku Usaha
2	- Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi	- Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	- 10%
	Keg. Meningkatnya fasilitasi sarana prasarana perdagangan sesuai standar	- Persentase sarana prasaran perdagangan sesuai standar	- 10%
	Sub.keg Terbinanya Pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- 1 Kab/ Kota (Morowali)
	Sub.keg Terbinanya Pelaku Usaha yang difasilitasi di Pasar Lelang Komoditas	- Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi di pasar lelang komoditas	- 3 Pelaku Usaha
	Sub.keg Terevaluasinya pelaksanaan fasilitasi pasar lelang komoditas	- Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pasar lelang komoditas	- 1 Laporan
	Sub.keg Terfasilitasinya Pembentukan Managemen SRG di Kab. Toli-Toli dan Kota Palu	- Jumlah SRG yang terfasilitasi Pembentukan Managemennya	- 1 SRG
3	- Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	- Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- 5,5%
	Keg. Meningkatnya jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- 100%
	Sub.keg Termonitoringnya ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Subdistributor di 13 Kab/Kota	- Jumlah Laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok ditingkat distributor dan subdistributor di 13 Kab/Kota	- 4 Laporan
	Sub.keg Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota	- Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota	- 1 Kegiatan
	Sub.keg Termonitoringnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	- Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	- 4 laporan
	Sub.keg Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13 Kab/Kota	- Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13 Kab/Kota	- 1 Kegiatan

	Keg. Meningkatkan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota yang ditindak lanjuti	-	90%	
	Sub.keg	Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	1 Dokumen
	Sub.keg	Terpantaunya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	-	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	-	4 Laporan
	Sub.keg	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Pokok Murah dalam rangka Stabilisasi Harga	-	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Pokok	-	20 Kegiatan
	Keg.	Meningkatnya pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi	-	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	-	90%
	Sub.keg	Terkoordinasinya Penyaluran pupuk bersubsidi	-	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi	-	5 Laporan
4	-	Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada kegiatan pameran produk dalam negeri	-	10%
	Keg.	Meningkatnya keikutsertaan pelaku usaha pada kegiatan pameran produk dalam negeri	-	Persentase pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran produk dalam negeri	-	10%
	Sub.keg	Terfasilitasinya UMKM dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	-	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	-	2 UMKM
	Sub.keg	Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	1 Laporan
	Keg.	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek produk dalam negeri	-	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	-	10%
	Sub.keg	Terfasilitasinya UMKM dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	-	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	-	80 UMKM
	Sub.keg	Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	1 Laporan
	Keg.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya penggunaan produk dalam negeri	-	Persentase masyarakat yang paham pentingnya penggunaan produk dalam negeri	-	80%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 37,397,250	APBD
Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan	= Rp. 37,397,250	
Sub.keg Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	= Rp. 37,397,250	
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp. 99,354,400	APBD
Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi	= Rp. 99,354,400	
Sub.keg Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	= Rp. 39,792,900	
Sub.keg Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	= Rp. 44,979,000	
Sub.keg Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi	= Rp. 14,582,500	

3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	= Rp. 1,550,525,250	APBD
	Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	= Rp. 56,075,200	
	Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	= Rp. 35,756,750	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	20,318,450	
	Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	= Rp. 1,464,417,550	
	Sub.keg Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	= Rp. 181,879,650	
	Sub.keg Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	= Rp. 1,282,537,900	
	Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah	= Rp. 30,032,500	
	Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	= Rp. 30,032,500	
4.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp. 124,368,300	APBD
	Keg. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	= Rp. 51,457,600	
	Sub.keg Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	= Rp. 51,457,600	
	Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp. 58,475,900	
	Sub.keg Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	= Rp. 58,475,900	
	Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp. 14,434,800	
	Sub.keg Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp. 14,434,800	



Palu, 6 NOVEMBER 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
NIP. 19770405 200212 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAJAR SETIAWAN, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

FAJAR SETIAWAN, SE, MM
NIP. 19830304 200112 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Meningkatkan Kemudahan Proses Perizinan Usaha Perdagangan luar negeri	- Persentase Izin Usaha Perdagangan luar negeri yang Difasilitasi	- 100%
	Keg Meningkatkan Pelayanan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sesuai ketentuan yang berlaku	- Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	- 100%
	Sub.Keg Terfasilitasinya Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	- Persentase Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	- 100%
	Sub.Keg Tersosialisasinya Layanan Klinik Ekspor Sulteng bagi Mahasiswa sebagai upaya menumbuhkan ekosistem	- Jumlah mahasiswa tersosialisasi	- 40 orang
2	- Terwujudnya Pengembangan Ekspor	- Nilai ekspor	- 23.470,964 Juta USD
	Keg Meningkatkan Promosi bagi Produk Ekspor Unggulan Daerah	- Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi	- 100%
	Sub.Keg Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	- Jumlah Pelaku Usaha/produk yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	- 3 Pelaku Usaha
	Sub.Keg Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	- Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	- 27 Pelaku Usaha
	Sub.Keg Terevaluasinya Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	- Jumlah Laporan evaluasi Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	- 3 Laporan
	Terlaksananya FGD Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor	- Jumlah Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor yang mengikuti FGD	- 14 petani
	Teridentifikasinya Kualitas Kopi Sulawesi Tengah	- Jumlah Pelaku Usaha Kopi Sulawesi Tengah yang mengikuti identifikasi	- 15 penggiat kopi

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 113,651,400	APBD
Keg Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi	= Rp. 113,651,400	
Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	= Rp. 113,651,400	
2. Program Pengembangan Ekspor	= Rp. 614,146,350	APBD
Keg Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui	= Rp. 614,146,350	
Sub.Keg Pameran Dagang Internasional/Nasional	= Rp. 186,341,000	
Sub.Keg Pameran Dagang Lokal	= Rp. 332,014,200	
Sub.Keg Peningkatan Citra Produk Ekspor	= Rp. 95,791,150	

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



RICHARD ABNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR
NEGERI



FAJAR SETIAWAN, SE. MM
Nip. 19830304 200112 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO MARDIONO, S.T., M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123N200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


EKO MARDIONO, S.T., M.A.P
NIP. 19770302 201001 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Meningkatkan realisasi Pembangunan Industri	- Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi	- 100%
	Keg Terfasilitasinya angkatan kerja melalui kegiatan vokasi	- Jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi	- 50 Orang
	Sub.keg Tersusunnya dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) Sulawesi	- Jumlah dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) yang tersusun	- 1
	Sub.keg Terfasilitasinya penyusunan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota.	- Jumlah laporan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota yang terfasilitasi	- 1
	Sub.keg Tersedianya data fasilitasi Bina Pelaku Industri	- Jumlah Laporan fasilitasi Bina Pelaku Industri (Laporan)	- 1
	Sub.keg Terevaluasinya sasaran rencana pembangunan industri	- Jumlah Laporan Evaluasi sasaran rencana pembangunan industri (Laporan)	- 2
	Sub.keg Tersedianya Data Potensi Bahan Baku Industri	- Jumlah Data Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia (Laporan)	- 1
	Sub.keg Terlatihnya Tenaga Kerja Industri	- Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih (orang)	- 15
	Sub.keg Terfasilitasinya HAKI	- Jumlah Sertifikat HAKI yang Terfasilitasi	- 45
	Sub.keg Tersosialisasinya Kebijakan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.	- Jumlah sosialisasi terkait Kebijakan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (sosialisasi)	- 1
	Sub.keg Terevaluasinya capain realisasi PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	- Jumlah laporan capaian realisasi PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang terevaluasi (laporan)	- 1
2	- Meningkatkan Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	- Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	- 100%
	Keg Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	- Persentase izin usaha Industri yang terawasi dan terkendali (%)	- 77%
	Sub.keg Terawasinya Perizinan Berusaha sektor perindustrian	- Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terawasi	- 3
	Sub.keg Terkendalinya Perizinan Berusaha sektor perindustrian	- Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terkendali	- 3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 622,934,000	APBD
Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 622,934,000	
Sub.keg Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	= Rp. 144,604,150	
Sub.keg Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	= Rp. 106,924,000	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	= Rp. 371,405,850	

2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	= Rp.	183,910,850	APBD
	Keg Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	= Rp.	183,910,850	
	Sub.keg Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	= Rp.	125,207,900	
	Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	= Rp.	58,702,950	

Palu, 6 NOVEMBER 2025



PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

RICHARD ARNALDO, SE.MSA
 NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA
INDUSTRI

EKO MARDIONO, S.T., M.A.P
 NIP. 19770302 201001 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE. MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN
PEMBERDAYAAN INDUSTRI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	- Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	- 93,04%
	Keg Meningkatkan Persentase pertumbuhan industri	- Persentase Pertumbuhan jumlah industri	- 4,7%
	Terlaksananya Penerapan Peraturan mengenai Perwilayahan dan Peraturan Peraturan lainnya	- Penerapan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayan dan Peraturan lainnya	- 1
	Terlaksananya koordinasi terkait perkembangan perwilayahan, kawasan industri	- Jumlah koordinasi terakit perwilayahan, kawasan industri	- 1
	Sub.keg Terpenuhinya penerapan standarisasi pelaku industri	- Jumlah pelaku industri yang mengikuti sosialisasi standarisasi produk	- 50
	Terbinanya Pelaku usaha industri	- Jumlah pelaku usaha industri yang terbina	- 210
	Sub.keg Terfasilitasinya Pelaku usaha industri	- Jumlah pelaku usaha industri yang terfasilitasi	- 130
	Terbinanya Sentra Industri	- Jumlah sentra yang terbina	- 10 Sentra
2	- Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	- Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	- 89%
	Keg Terawasinya industri kewenangan provinsi yang melapor pada SIINas	- Persentase industri kewenangan provinsi yang melapor pada SIINas	- 67,02%
	Terlaksananya Pelayanan Permintaan/Bantuan data dan informasi industri	- Jumlah pelayanan informasi/konsultasi industri	- 2
	Tersedianya data directory IKM	- Jumlah data IKM yang terverifikasi	- 200
	Sub.keg Terpublikasinya Informasi Perkembangan Pelaku Usaha Industri Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengolahan Data Industri (SIPEDAS)	- Jumlah Informasi Perkembangan Pelaku Usaha Industri Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengolahan Data Industri (SIPEDAS) yang terpublikasi	- 1
	Terusunnya Buku Profil Industri Sulawesi	- Jumlah Buku Profil Industri Sulawesi Tengah	- 1
	Terlaksananya Integrasi Data (antara SIINas dan SIPEDAS SulTeng)	- jumlah data yang terinput dan tervalidasi pada SIPEDAS yang bersumber dari SIINas	- 1
	Sub.keg Terpantaunya kepatuhan perusahaan dalam melakukan pelaporan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Jumlah perusahaan dalam melakukan pelaporan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terpantau	- 50
	Sub.keg Terpantaunya kepatuhan pelaku Industri dalam melakukan pelaporan	- Jumlah pemantauan kepatuhan perusahaan yang melapor	- 2

1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp.	4,927,745,250	APBD
	Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp.	4,927,745,250	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	= Rp.	21,262,200	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	= Rp.	74,290,000	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	= Rp.	4,832,193,050	
2.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	= Rp.	38,057,735	APBD
	Keg Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	= Rp.	38,057,735	
	Sub.keg Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	= Rp.	9,832,950	
	Sub.keg Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	= Rp.	12,167,135	
	Sub.keg Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	= Rp.	16,057,650	

Palu, 6 NOVEMBER



PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
Nip.19730831 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

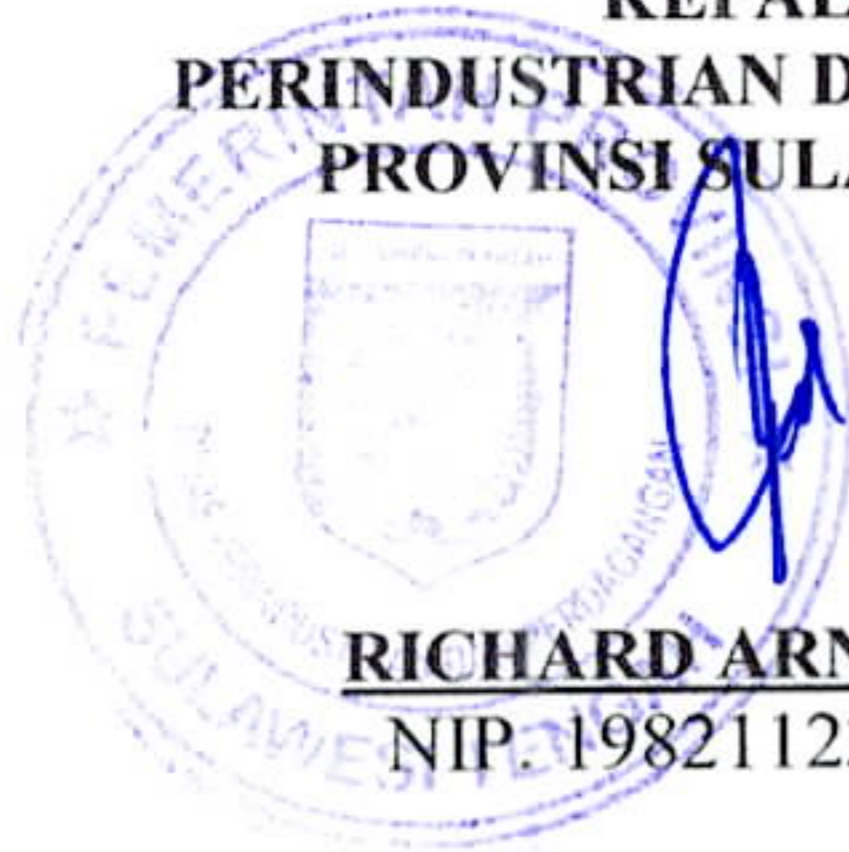
PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6-NOVEMBER 2025

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat	- 76,51-88,30
Keg	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	- 90
	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase layanan ketatausahaan yang tepat waktu	- 100
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	- Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu	- 100
	Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase layanan jasa penunjang tepat waktu	- 100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	- 100
	- Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk	- Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi yang terakreditasi dan Non akreditasi	- 86%
Keg	Terlaksananya Kalibrasi alat ukur industri dan usaha berdasarkan standar internasional (SI)	- Persentase kalibrasi alat ukur ukur industri dan usaha berdasarkan standar internasional (SI)	- 100
	Terlaksananya Pengujian mutu komoditi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	- Persentase pengujian komoditi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	- 100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 7,193,857,805	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	= Rp. 284,430,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	= Rp. 83,813,113	
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	= Rp. 6,503,948,876	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp. 264,726,848	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	= Rp. 126,367,292	
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 529,227,358	APBD
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	= Rp. 440,935,431	

Palu, 6 NOVEMBER 2025



**PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG**

NOLVANITA LAJJIDJI, S. Ag. M.M
NIP. 19730801 200701 2 029



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**
Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731121 200701 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat	- 90
Keg	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	- 90
	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase layanan ketatausahaan yang tepat waktu	- 100
	Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase layanan jasa penunjang tepat waktu	- 100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	- 100
	- Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	- Cakupan Bina Pelaku IKM (%)	- 15%
Keg	Terlaksananya fasilitasi layanan IKM	- Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	- 1069

Program	Anggaran	Keterangan
1		
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 784,053,125	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 391,740,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 45,423,315	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 199,436,310	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 147,453,500	
2		
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1,155,456,316	APBD
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Rp. 1,155,456,316	

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN KERAJINAN DAERAH



HAPIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat	- 90
	keg Meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	- 90
	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase layanan ketatausahaan yang tepat waktu	- 100
	Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase layanan jasa penunjang tepat waktu	- 100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	- 100
	- Meningkatkan Tertib Niaga Dan Mutu Produk	- Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	- 100
	keg Meningkatkan fasilitasi perlindungan konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase fasilitasi pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- 100
	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	- 80

Program

Keterangan

1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp370,324,400	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	= Rp231,960,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	= Rp28,045,700	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp48,606,800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp61,711,900	
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp1,077,726,800	APBD
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	= Rp945,669,400	
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	= Rp132,057,400	

Palu, 6 NOVEMBER 2025



**PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURDIANA, SE, MM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST. MM**
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 NOV 2025

**PIHAK KEDUA,
Plt. SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



DONNY IWAN SETIAWAN, ST. MM
NIP. 19770405 200212 1 009

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASSET DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NURDIANA, SE, MM
NIP. 19731202 200212 2 004

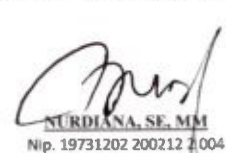
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Sub Keg.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- 134
Sub Keg.	Tersedianya honorarium PHL	- Jumlah PHL yang menerima honorarium	- 54
Sub Keg.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- 500
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- 12
Sub Keg.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- 1
Sub Keg.	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	- 2
Sub Keg.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	- 14
Sub Keg.	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 1
Sub Keg.	Terlaksananya Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- 1
Sub Keg.	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- 2
Sub Keg.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- 1
Sub Keg.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- 48
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 287
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	- 4

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Sub Keg. 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp15,389,417,000	
Sub Keg. 2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp850,950,000	
3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penutupan/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp364,090,050	
4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp119,409,850	
5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp46,226,400	
6 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp15,760,000	
7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp9,305,000	
8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp15,000,000	
Sub Keg. 1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp52,887,000	
2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp15,050,000	
3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp53,198,500	
Sub Keg. 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rp466,936,300	
Sub Keg. 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp161,460,000	
Sub Keg. 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp113,577,500	


PIHAK KEDUA
Pt./Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
 Nip. 19770405 200212 1 009

Pada, **06 NOV 2025**
PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

NURDIANA, SE, MM
 Nip. 19731202 200212 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LEVIANA MANGOPO, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Kalibrasi

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 NOV 2025

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KALIBRASI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


LEVIANA MANGOPO, ST
NIP. 19851031 201101 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlayannya permohonan kalibrasi alat ukur produksi dan usaha	Persentase permohonan kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang terlayani	100%
	Terjaminnya kualitas kalibrasi melalui surveillance	Hasil penilaian surveillance	100%
	Terukurnya layanan kalibrasi melalui uji profisiensi	Nilai hasil uji profisiensi	100%
	Rekalibrasi alat standar	Jumlah alat yang di rekalibrasi	10 Alat Kerja
	Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan layanan kalibrasi	Jumlah dokumen analisis kebutuhan layanan kalibrasi	3 Dokumen
	Terbimbingnya Tenaga Teknis Kalibrasi Peralatan Ukur	Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing	7 orang

Sub Kegiatan
Sub Keg. 1 Pengembangan Layanan Kalibrasi

Anggaran
Rp102,424,050

Keterangan

Palu, 06 NOV 2025

PIHAK KEDUA
 Kepala UPD Pengujian Sertifikasi
 Mutu Barang

NOLYANTIA LAJIDJI S.Az., M.M
 Nip. 197308012607012029

PIHAK PETAMA
 Kepala Seksi Kalibrasi

LEVIANA MANGOFO S.T
 Nip. 198510312011012006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARFAN, S.Ap
Jabatan : Plh. Kepala Tata Usaha UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 NOV 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



NOLVANITA LADJIDJI S.Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PIHAK PERTAMA,
Plh. KEPALA TATA USAHA UPTD
PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SARFAN, S.Ap
Nip. 19691205 199103 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Sub Keg.	Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan BMD	Jumlah pegawai yang menerima honorarium	54
Sub Keg.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
Sub Keg.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
Sub Keg.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1
Sub Keg.	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Umi Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 alat (5 alat utama dan 10 alat pendukung)
Sub Keg.	Tersusunnya laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat	1
Sub Keg.	Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
	Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
Sub Keg.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp284,430,000	
Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1,615,173	
Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp19,830,590	
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp16,086,350	
Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp46,281,000	
Sub Keg. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp6,550,618,826	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp12,688,000	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp191,083,196	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp60,955,652	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp4,050,000	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp38,150,000	
Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp41,760,000	
Sub Keg. pengadaan Meubel	Rp46,669,950	
Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp42,407,292	



Palu, **06 NOV 2025**
PIHAK PERTAMA
 PIt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

[Signature]
SARFAN, S. Ag.
 Nip. 19691205 199103 1 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIDYAWATI, S.Pt**
Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 NOV 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WIDYAWATI, S.Pt
NIP. 19750607 200112 2 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Keg.	Terpantainya Mutu Produk Unggulan	Jumlah Produk Unggulan yang terpantau - - 2 Produk
	Sub Keg.	Tersedianya Kelengkapan Laboratorium Pengujian dan Bahan Kimia untuk Pemantauan Mutu Produk	Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang tersedia - - 1 Paket
		Terlayannya permohonan Pengujian mutu barang	Persentase permohonan Pengujian Mutu Barang yang terlayani - - 100%
		Terselenggaranya Bimtek Pengujian untuk Penambahan Ruang Lingkup Nutrisi Pangan	Jumlah kegiatan Bimtek Pengujian untuk Penambahan Ruang Lingkup Nutrisi Pangan - - 1 Kegiatan
	Sub Keg.	Tersedianya kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia	Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang tersedia - - 1 Paket
		Terukannya kinerja laboratorium melalui uji profisiensi	Nilai hasil uji profisiensi - - 100%
		Terjaminnya kualitas Layanan Lembaga Sertifikasi Produk melalui surveillance (Penambahan Ruang Lingkup Produk)	Hasil penilaian surveillance - - 100%

Sub Kegiatan
Sub Keg. 1 Pemantauan Mutu Produk
2 Pengembangan Layanan Pengujian
3 Pengembangan Layanan Sertifikasi Produk

Anggaran
Rp75,097,100
Rp224,706,581
Rp38,707,700

Keterangan


PIHAK KEDUA
 Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
NOLANITA ABJIDIL S. Ag., M.M
 Nip. 19750801 200701 2 029

Palu, **06 NOV 2025**
PIHAK PETAMA
 Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang


WIDYAWATI, S.Pr
 Nip. 19750607 200112 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROY EDWARD KUMAAT, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM**
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 NOV 2025

PIHAK KEDUA,
PLT. SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

ROY EDWARD KUMAAT, SE
NIP. 19820321 200904 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
(1)	(2)	(3)		(4)	
Sub Keg.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	10
Sub Keg.	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	-	1
Sub Keg.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	-	1
Sub Keg.	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	-	1
Sub Keg.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	-	1
Sub Keg.	Tersusunnya dokumen capaian IKU Perangkat Daerah. dan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah.lainnya	-	Jumlah laporan capaian IKU PD dan dokumen evaluasi kinerja PD.lainnya	-	5

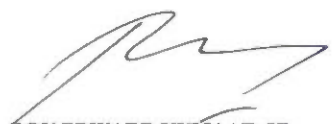
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Sub Keg. 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp277,825,800	
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp10,824,750	
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp2,800,000	
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp6,809,950	
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp4,526,550	
6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp74,130,200	



PIHAK KEDUA
Pjt. Sekretaris Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan

DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
 Nip. 19770405 200212 1 009

Palu, **06 NOV 2025**
PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program


ROY EDWARD KUMAAT, SE
 Nip. 19820321 200904 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE**

Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HAPIT TOLLA, SE**

Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **06 NOV 2025**

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

HAPIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPTD
PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI
PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE
NIP. 19780622 201001 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Sub Keg.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- 1 Dokumen
Sub Keg.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- 1
Sub Keg.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- 1
Sub Keg.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- 1
Sub Keg.	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	- Jumlah Laporan Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	- 1 Laporan
Sub Keg.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 12
Sub Keg.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1
Sub Keg.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- 34
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 46

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp391,740,000	
Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2,410,965	
Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp31,695,050	
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp2,477,300	
Sub Keg. Fasilitasi kunjungan tamu	Rp8,840,000	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp159,436,310	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp40,000,000	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp82,033,500	
Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp45,420,000	


Kepala UPTD pengembangan produk industri pangan dan kerajinan daerah



HAPIT TOPIA, SE
Nip. 197311212007011009

Palu, 06 NOV 2025

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah



LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE
Nip. 1978062220010011007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VERADIAN SAPHIRE,SP,MM**
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**
Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 NOV 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN
DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI

[Handwritten Signature]

HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
PRODUK PANGAN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

VERADIAN SAPHIRE,SP,MM
NIP. 19750319 199603 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
	Sub Keg.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri.	Presentase Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri yang Berkualitas	100%
	Sasaran	Terfasilitasinya layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM Pangan dan Masyarakat	Jumlah layanan bagi pelaku usaha IKM, Mahasiwa, Pelajar dan Masyarakat yang terfasilitasi	210
		Terbinanya IKM dalam peningkatan mutu produk	Jumlah Pelaku Usaha IKM yang terbina	50
		Terfasilitasinya promosi dan pemasaran produk IKM Pangan	Jumlah Promosi dan pemasaran produk IKM yang terfasilitasi	100
		Tertribusinya Pendapatan Asli Daerah Sumber layanan Galeri Rumah Cokelat	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan Galeri Rumah Coklat	Rp 25000000
		Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri pangan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan industri kemasan dan kerajinan	1 Dokumen

Sub Kegiatan
Sub Keg. 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Anggaran
Rp125,370,970

Keterangan

Patu, 06 NOV 2025

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD pengembangan produk industri pangan dan kerajinan daerah



PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

VERADIAN SAPHIRE, SP, MM
Nip. 19750319 199603 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN. M, ST, MM**
Jabatan : **Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**
Jabatan : **Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah**

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **06 NOV 2025**

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731421 200701 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK
PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RIDWAN. M, ST, MM
NIP. 19680721 201112 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Keg dan Sub Keg	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri.	Presentase Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri yang berkualitas
	Sasaran	Terfasilitasinya konsultasi dan jasa layanan kemasan produk dan kerajinan bagi pelaku usaha IKM dan Masyarakat	100%
		Terbinanya IKM dalam Peningkatan mutu produk kemasan dan kerajinan	Jumlah Jasa dan layanan Konsultasi bagi pelaku usaha IKM dan Masyarakat yang terfasilitasi
			460 Pelaku IKM dan Masyarakat
		Terbinanya IKM dalam Peningkatan mutu produk kemasan dan kerajinan	Jumlah Pelaku Usaha IKM yang terbina
			110 Pelaku IKM
		Terfasilitasinya Promosi dan Pemasaran Produk IKM Kerajinan	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk IKM
			1 Dokumen
		Terkelolanya website layanan IKM kemasan	Jumlah Website admin rumah kemasan dan layanan IKM yang dikelola
			1 Dokumen
		Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi rencana koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan Industri kemasan dan kerajinan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Industri Kemasan dan Kerajinan
			1 Dokumen
		Teretribusinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber layanan Rumah Kemasan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Layanan rumah kemasan
			Rp80,000,000

Sub Kegiatan
Sub Keg. 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Anggaran
Rp897,930,782

Keterangan

Palu, 06 NOV 2025

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD pengembangan produk
industri pangan dan kerajinan daerah



PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah

RIDWAN. M.ST.MM
Nip. 19680721 201112 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURWATA,SE**

Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**

Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

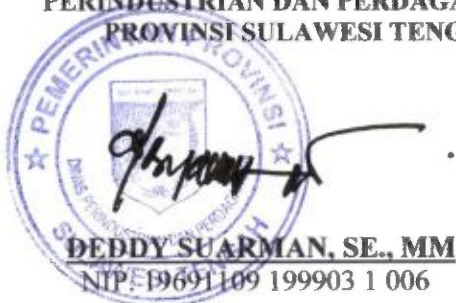
PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 NOV 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PEMBERDAYAAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PURWATA,SE
NIP. 19710610 199103 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Keg.	Terfasilitasinya aduan konsumen	Jumlah aduan konsumen yang difasilitasi 43
	Sub Keg.	Terverifikasi dan terevaluasinya kinerja BPSK secara berkala	Jumlah laporan verifikasi dan evaluasi kinerja BPSK 4 Laporan
	Sub Keg.	Terfasilitasinya pengusulan BPSK di Kab Banggai	Jumlah usulan BPSK di Kab Banggai 1 BPSK
	Sub Keg.	Tersosialisasinya eksistensi BPSK dan prosedur pengaduan konsumen	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait eksistensi BPSK dan prosedur pengaduan konsumen 3 kegiatan
	Sub Keg.	Tersaksananya Survey IKK (Indeks Keberdayaan Konsumen)	Jumlah responden yang mengisi Kuisisioner 100 Orang
	Sub Keg.	Terfasilitasinya BPSK Kab/Kota	Jumlah BPSK Kab/Kota yang terfasilitasi 4 BPSK
	Sub Keg.	Tersosialisasinya Kinerja LPKSM di daerah Kabupaten Parigi Moutong	Jumlah masyarakat tersosialisasi terkait kinerja LPKSM 25 Orang

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Sub Keg.	1 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Rp873,436,050	
	2 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Rp53,863,350	
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Rp18,370,000	

Palu, 06 NOV 2025

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis
Pengawasan Dan Perlindungan
Konsumen



DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 196911091999031006

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen



PURWATA-SE
Nip. 197106101991031005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN N.ALISE**

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga Dan Penegakkan Hukum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**

Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 NOV 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN
JASA, TERTIB, NIAGA DAN PENEGAKKAN
HUKUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

RIDWAN N.ALISE
NIP. 19780531 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar sesuai parameter ketentuan	- Jumlah laporan pengawasan barang beredar yang sesuai ketentuan Perlindungan Konsumen	- 2 Laporan
	Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Tertib Niaga	- Jumlah laporan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Tertib Niaga	- 1 Laporan
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pengawas Perdagangan	- Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis bidang pengawasan	- 4 Orang
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Pengawasan Barang	- Jumlah kegiatan sosialisasi/edukasi pengawasan barang beredar	- 1 kegiatan
Sub Keg.	Terlaksananya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan	- Jumlah Kasus Yang ditangani	- 8 Kasus

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rp74,117,650	
2 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rp57,939,750	

Palu, 06 NOV 2025



PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga
Dan Penegakkan Hukum



RIDWAN N. ALISE
Nip. 19780531 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRIYANI, SE**
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 NOV 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 196911091999031006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPTD
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

INDRIYANI, SE
NIP. 197110181992022006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Sub Keg.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1
Sub Keg.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1
Sub Keg.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
Sub Keg.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
Sub Keg.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp231,960,000	
Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp7,695,700	
Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp20,350,000	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp47,256,800	
Sub Keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp1,350,000	
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp39,966,900	
Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp6,740,000	
Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp15,005,000	


Palu, 06 NOV 2025

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis
Pengawasan Dan Perlindungan
Konsumen



BEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan
Konsumen



INDRIYANI, SE
Nip. 19711018 199202 2 006